

**ANALISIS DUA LOGIKA PLURAL TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI
RUSIA KE UKRAINA DI TAHUN 2014-2022**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

Oktaviano Nandito Guntur (E061181328)

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS DUA LOGIKA PLURAL TERHADAP KEBIJAKAN
LUAR NEGERI RUSIA KE UKRAINA DI TAHUN 2014-2022

N A M A : OKTAVIANO NANDITO GUNTUR

N I M : E061181328

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 26 Januari 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608132005011003

Pembimbing II,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS DUA LOGIKA PLURAL TERHADAP KEBIJAKAN
LUAR NEGERI RUSIA KE UKRAINA DI TAHUN 2014-2022

N A M A : OKTAVIANO NANDITO GUNTUR

N I M : E061181328

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 25 Januari 2023.

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktaviano Nandito Guntur

Nomor Induk : E061181328

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Dua Logika Plural terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina di Tahun 2014-2022)”

Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan tidak diambil alih dari karya tulisan orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika pada kemudian hari ditemukan bukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang telah saya cantumkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Januari 2023



Oktaviano Nandito Guntur

ABSTRAK

Oktaviano Nandito Guntur, (E061181328), “Analisis Dua Logika Plural terhadap Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina di tahun 2014-2022”, dibawah bimbingan **Agussalim, S.I.P., MIRAP** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.I.P., MA** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina di tahun 2014-2022. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Rusia ini, penelitian ini menggunakan pendekatan Marxisme dalam HI. Secara spesifik, pendekatan ini adalah pendekatan dua logika plural. Pendekatan dua logika plural menyetengahkan pentingnya untuk mengkalkulasikan logika sistemik kapitalisme (akumulasi kapital) dan juga logika sistemik geopolitik (akumulasi teritorial) dalam membaca dunia internasional. Pada konteks kebijakan luar negeri, kontekstualisasi pendekatan ini mengikuti logika berpikir level analisis yang terkandung dalam analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*). Adapun kontekstualisasi ini mengarah pada analisis terhadap dunia internasional, keadaan domestik, dan signifikansi aktor. Dalam kaitannya dengan ini, pendekatan dua logika plural menyetengahkan deskripsi maupun analisis yang cukup distingtif dengan mendeskripsikan dunia internasional dalam struktur imperialisme, keadaan domestik dengan perkembangan kapitalisme suatu negara, dan aktor dengan aliansi elit politik dan kelas kapitalis suatu negara.

Berdasarkan ciri distingtif ini, analisis dari penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama. *Pertama*, pada tataran internasional, manuver ekspansionis ekonomi Uni Eropa dan imperialisme Amerika ke Ukraina memainkan peran krusial dalam mengondisikan kebijakan luar negeri Rusia yang agresif Ukraina. Hal ini kemudian berperan sebagai *pull factor*. *Kedua*, trajektori perkembangan historis spesifik kapitalisme Rusia dan kemunculan Putin sebagai Caesarisme regresif mengondisikan dorongan Rusia untuk melakukan kebijakan yang agresif terhadap Ukraina. Hal ini kemudian berperan sebagai *push factor*. *Ketiga*, relasi di antara dua variabel di muka adalah dialektis sifatnya. Artinya, kebijakan luar negeri Rusia yang agresif tidak akan terjadi tanpa keberadaan salah satu variabelnya.

Kata Kunci: Imperialisme Amerika, Ekspansi Uni Eropa, Kapitalisme Rusia, dan Caesarisme Regresif

ABSTRACT

Oktaviano Nandito Guntur, (E061181328), “ Dual Logical Plural Analysis toward Russia Foreign Policy in Ukraine since 2014-2022”, under the guidance of **Agussalim, S.I.P., MIRAP** as the first promotor and **Aswin Baharuddin,S.IP,MA** as the second promotor in International Relations Department, Social and Politics Faculty, Hasanuddin University.

This research aims to analyse Russian foreign policy toward Ukraine since 2014-2022. Marxist International Approach is being used as the main paradigm. Specifically, it uses dual logical plural approach which proposed by Harvey, Arrighi, and Alex Callinicos. This approach basically put a great significance on the importance of two systemic logic, namely capitalism(capital accumulation) and geopolitics (teritorial accumulation) in understanding international world. Since this approach is used in foreign policy analysis realm, contextualization is needed. This refers to the level analysis thinking in FPA which encompass international, domestic, and the role of specific actor as the significance unit of analysis. Based on these contextualitation, dual logical plural approach propose a distinctive description on these levels of analysis. International condition refers to imperialism in the contemporary world order, domestic factor refers to the development of one’s state capitalism, and actors refer to the alliance of political elite and capitalist class of a state.

Based on those distinctive features, this research concludes several crucial points. *First*, the expansionist economic maneuver of European Union and imperialist maneuver of US plays crucial role in affecting the Russian aggressive foreign policy toward Ukraine since 2014-2022. This factor is a pull factor. *Second*, the specific history of Russian capitalism development which gave birth to the emergence of regressive Caesarism plays significant role as well. This factor is a push factor. *Third*, the relation of these two factors is connected dialectically. It means that without one of these factors Russian foreign policy would be totally different.

Keywords: American Imperialism, European Union Expansion, Russian Capitalism, and Regressive Caesarism

KATA PENGANTAR

Penulisan ini secara general berangkat dari dua keresahan akademis mendasar. *Pertama*, di HI Unhas, Rusia tidak mendapat porsi penjelasan yang sama seperti negara-negara signifikan lainnya (sebut saja Australia, Amerika, atau Tiongkok). Hal ini, untuk saya, menyiratkan asumsi bahwa Rusia tidak signifikan dulu. Padahal, sejak 20 tahun terakhir, Rusia memiliki peran yang cukup signifikan dalam dunia internasional. Ketika isu Rusia-Ukraina muncul di permukaan, pemahaman yang komprehensif terkait negara ini malah sangat minim. *Kedua*, pendekatan Marxis dalam HI yang kerap salah dimengerti, *disudzon-i*, dan juga kerap tidak mendapat porsi yang cukup komprehensif. Sepertinya, warisan orde Baru terlampaui kuat ke ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Tidak terkecuali HI.

Berangkat dari dua keresahan inilah penelitian ini bermula. Pada tempat pertama, tujuan mendasarnya sederhana. Saya ingin melakukan eksperimentasi terhadap pendekatan Marxis dalam membaca realitas internasional dan ingin menunjukkan ciri distingtif berikut kebergunaannya. Dalam prosesnya, untuk saya, penelitian ini sudah cukup menjadi bukti bahwa pendekatan Marxis mampu melakukan itu. Bahkan, dengan sedikit tendensi asertif, pendekatan ini mampu memberi alternatif jawaban yang jauh berbeda dengan pandangan berbagai akademisi di Indonesia (dan bahkan beberapa di dunia) yang cenderung melakukan dikotomi siapa salah/benar. Konsekuensi lanjutannya adalah penawaran sikap politik yang radikal terhadap isu Rusia-Ukraina lebih bisa ditawarkan oleh pendekatan Marxis. Pengalaman Indonesia sendiri secara historis sebenarnya sudah membuktikan ini. Gerakan Non-Blok, yang radikal pada masanya, secara dominan hadir karena pemahaman

para elit politik yang melek terhadap imperialisme—kosakata yang sangat Marxis—Amerika dan Uni Soviet. Tanpa pemahaman terhadap situasi itu, sikap radikal semacam itu hampir-hampir musykil untuk dibayangkan. Oleh karena itu, alasan-alasan remeh dan non-intelektuil terkait penolakan pendekatan Marxis sudah seharusnya dibuang jauh-jauh.

Di samping itu, meski telah menghasilkan paparan berikut temuan penelitian dari pendekatan Marxis secara cukup panjang, penelitian ini bukan tanpa kekurangan. Penulis sendiri merasa kekurangannya cukup fundamental. Ini kurang lebih mengarah pada dua hal mendasar. *Pertama*, pendekatan yang penulis gunakan, dua logika plural, bukanlah suatu pendekatan yang sudah begitu sistematis. Hal ini membuat penulis cukup eklektis dalam mengelaborasi beberapa konsep krusial. Mulai dari imperialisme Amerika, teorisasi negara Marxis dari perspektif strategis relasional, maupun signifikansi aliansi elit politik dan kelas kapitalis dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Satu-satunya argumentasi penulis terhadap keterkaitan keseluruhan konsep ini adalah mereka memegang asumsi yang sama, yaitu adanya otonomi parsial negara (berikut elit politiknya) terhadap logika sistemik kapitalisme. Konsekuensi logisnya, realitas internasional adalah realitas di mana kapitalisme mesti difasilitasi oleh negara, sedangkan realitas domestik adalah ranah perebutan pengaruh dari berbagai kelompok sosial terhadap institusi bernama negara. Meski begitu, hal ini tetap rentan keliru. Karena, secara jujur, penulis perlu mengakui, keterhubungan strategis antara berbagai konsep yang telah diajukan tidak pernah diajukan oleh masing-masing pemikir yang penulis telah ajukan (mulai dari Alex Callinicos, Peter

Gowan, maupun Bob Jessop) tidak pernah diutarakan secara langsung oleh penggagas konsep-konsep yang penulis pakai pemikirannya. Untuk itu, ini adalah murni eksperimentasi penulis sendiri. Sangat rentan keliru dan tidak kuat secara metodologis. *Kedua*, pada prosesnya, penulis tidak mensituasikan hasil penelitian penulis dalam perdebatan di kalangan Marxis sendiri. Situasi ini memperdebatkan tema mendasar dalam kosakata Marxis Internasional, yaitu imperialisme (apakah Rusia adalah negara imperialis atau bukan); lihat misalnya debat di antara Probsting, Claudio Katz, Ruslan Dzarasov, dll. Meski begitu, hasil penelitian penulis tetap memberi suatu tawaran penjelasan yang tetap bisa dianggap kontributif. Sebab, kalkulasi terhadap signifikansi dan rasionalitas ekonomi di balik manuver Rusia tetap penulis ajukan. Ini terlebih dengan mengidentifikasi spesifikasi kapitalisme Rusia dan rezim yang kemudian membantu menopang dan melegitimasi; *special thanks to Vlodymyr Ischenko* untuk paparan konsep dan jawabannya melalui email.

Berkaitan dengan kesemua hal tersebut, pada tempat yang terakhir, penulis merasa perlu untuk mengajukan rasa terima kasih terhadap beberapa pihak yang bersumbangsih terhadap bantuan intelektual akademik maupun moral dalam pengerjaan skripsi ini. Pada tempat pertama, ada Vlodymyr Isschenko yang berkontribusi besar terhadap argumentasi penulis terkait Caerisme Putin yang terinspirasi dari Gramsci dan bahkan masih meluangkan waktu dalam menanggapi email penulis yang cukup remeh. Lalu, bung Hizkia Yoshie yang sudah memberi penulis rekomendasi bacaan krusial terkait *the best practice*

analisis HI soal situasi terkini imperialisma Amerika (Peter Gowan, Bulent Gokay, Justin Rosenber, dkk). Ka Agussalim Burhanuddin, Aswin Baharuddin, dan Bama Andika Putra sebagai pembimbing yang memberi masukan berharga dan teman diskusi yang menantang dalam berbagai kesempatan. Dua nama pertama yang saya sebut bahkan sudah bukan seperti dosen, melainkan kakak yang bersedia untuk saya ajak diskusi apa saja. Dan seluruh jajaran staf departemen HI Unhas yang dalam banyak hal telah memberi saya ruang untuk banyak mengeksplorasi minat saya dan tetap mengapresiasinya.

Di samping itu, ada Sidratul Muntaha dan Putu Dinda Ayudia yang bersedia mendengarkan ocehan penulis setiap kali habis membaca konsep-konsep *njlimet* dan saling memberi semangat terhadap perkembangan personal masing-masing. Alif, Riswan, Mufli, Rio, Ius, Oni, Alfreda, Cawang, dan Saldi yang sebagai junior masih bersedia untuk menaruh kepercayaan, meski telah mengalami peminggiran masif, kepada saya sebagai senior mereka. Azhar, Robby, Ahmad, Nahda, Winky, dan Setyawan Wirapraja teman angkatan yang ada di saat suka dan duka dan masih menaruh kepercayaan ke saya sebagai teman mereka. Bella, Anna, Rini, Ikhlas, Fahmi, dan Kumbang yang percaya dengan kesungguhan saya untuk berubah dan juga tentang proses pengampunan. Ka Iccang, ka Bayu, ka Rial, ka Rizal, ka Aci, ka Gun, ka Ignas, ka Echa, ka Fathul dan ka Restu sebagai sosok kakak yang sangat dekat dan selalu bersedia menemani penulis untuk bercanda dan menaruh kepercayaan ke saya sebagai junior yang rentan salah dan percaya bahwa saya mungkin untuk menjadi lebih baik. Tanpa kalian-kalian ini, setelah seluruh kehancuran

yang sempat melanda masa dua tahun terakhir saya di kampus, saya hampir-hampir tidak mampu membayangkan penyelesaian studi ini. Untukku, kontribusi kalian tidak sepele dan kata-kata bahwa *‘you never know knew exactly how much space you occupied in people’s lives’* perlu mendapat porsi penekanan yang kuat. Saya bersyukur bisa mengenal kalian semua. Sangat berharga dalam proses hidup saya ke depannya. Saya jarang ingin mengenang orang secara sungguh, tapi posisi kalian lumayan sulit terlupakan.

Untuk teman-teman dan mahasiswa modul Nusantara, Rani Purba, Ema, Mutiara, Hotma, Dendy, Johannes Haposan, dan semua yang belum sempat saya sebutkan namanya, terima kasih untuk kesempatannya mengajar dan menjalani kebersamaan dengan kalian. Tanpa kalian, masa-masa di kampus serasa ada yang kurang. Di samping itu, saya juga mengucapkan terima kasih ke orang-orang yang berkontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini tapi tidak sempat saya sebutkan namanya. Terima kasih banyak.

Pada tempat terakhir, untuk pihak yang paling saya sayangi, keluarga saya. Dukungan moral, material, maupun doa yang tidak terhitung banyaknya itu sudah selalu saya syukuri. Bapa Kanisius Guntur, mama Rosalia Dalima, kk Upi, kk Arka, dan kk Dei. Terima kasih untuk selalu berada di sisi adik bungsu kalian. Saya masih mau melambung tinggi dan saya percaya kalianlah yang sudah selalu ada di sisi saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk membuat saya selalu percaya bahwa keluarga itu ada.

Yang terakhir, penulis ingin mengutip beberapa kalimat Marx yang sekiranya akan terus menjadi semangat penulis ke depannya dalam menelusuri jalan intelektual yang akan

penulis terus rintis. Di tengah-tengah krisis global yang secara potensial akan semakin menjurus menjadi krisis geopolitik ke depannya, penulis pikir adalah perlu untuk memberi suatu penawaran penjelasan yang jauh lebih radikal dibanding pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Dan, ini tentu akan menghasilkan sikap politis yang jauh lebih radikal pula. Untuk itu, *the ruthless critique of everything existing* adalah mutlak perlu. Dari pengamatan penulis, literatur Marxis sudah selalu berada di jalan itu. Oleh karenanya, berangkat dari situasi yang telah penulis ajukan di muka, kata-kata Marx agaknya perlu dikumandangkan lagi, *de omnibus dubitandum!!!*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
1. Marxisme dan Analisis Kebijakan Luar Negeri.....	9
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	17
3. Tahapan Penelitian.....	18
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pendekatan Dua Logika Plural dan Analisis Kebijakan Luar Negeri.....	19
1. Dunia Internasional sebagai Imperialisme Amerika.....	22
2. Pendekatan Strategis-Relasional terhadap Negara.....	25
3. Elit Politik, Kelas Kapitalis, dan Kebijakan Luar Negeri	30
4. Simpulan	36
B. Penelitian Terkait yang Membahas Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina dari tahun 2014-2022	37

1. Realisme	38
2. Liberalisme	43
3. Konstruktivisme	48
4. Simpulan	53
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA KE UKRAINA DARI	
TAHUN 2014-2022.....	55
A. Pola dan Diskursus Dominan Kebijakan Luar Negeri Rusia setelah Keruntuhan Uni Soviet (1991-2022).....	
1. Diplomasi Pro-Barat (1991-1995)	58
2. Diplomasi Multipolar dan Kemunculan Ide Eurasianisme (1996-2006) ...	59
3. Diplomasi Negara Adidaya (2007-sekarang).....	61
4. Diskursus Dominan dari Kebijakan Luar Negeri Rusia Pasca Uni Soviet	63
B. Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Ukraina dari tahun 2014-2022	
1. Relasi Rusia-Ukraina sebelum Aneksasi Crimea	67
2. Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina dari tahun 2014-2022	73
C. Simpulan	
C. Simpulan	77
BAB IV.....	80
ANALISIS MARXIS TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA KE UKRAINA	
DARI TAHUN 2014-2022.....	80
A. Ekspansi Kapital Uni Eropa dan Imperialisme Amerika ke Eropa Timur dan Ukraina	
1. Relasi Uni Eropa dan Amerika: Subordinasi Struktural, Hegemoni, dan Dependensi	82

2. Ekspansi Uni Eropa ke Eropa Timur dan Ukraina: Neoliberalisme dan Penciptaan Relasi Pusat dan Pinggiran.....	97
3. Ekspansi Amerika ke Eropa Timur dan Ukraina : NATO dan Pertahanan Struktur Imperialisme Global di Eropa.....	107
B. Perkembangan Kapitalisme Rusia dan Ideologi Dominan Pasca Uni Soviet.....	116
1. Perkembangan Kapitalisme Rusia Pasca Disintegrasi: Elit Politik Oportunis, <i>Insider Rent</i> , dan <i>Short Termism</i>	117
2. Kemunculan Putin : Caesarisme dan Proyek Hegemoni Rezim.....	127
C. Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina 2014-2022: Relasi Dialektis antara Ekspansi Negara-Negara Barat dan Rezim Caesarisme Putin	140
BAB V	145
SIMPULAN.....	145
A. Simpulan.....	145
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2008, konflik antara Rusia dan Georgia terjadi. Meski mempunyai akar yang cukup panjang, konflik tersebut cukup mengagetkan. Sebab, perang antar negara diasumsikan sebagai praktik yang telah lama tidak dilakukan pasca perang dingin (Asmus, 2010; Hamilton, 2018). Konsekuensi langsung dari konflik ini cukup menguntungkan Rusia. Wilayah Georgia, seperti Ossetia dan Abkhazia dari Georgia berhasil independen dan semakin dekat dengan Moskow (Hamilton, 2018). Jika sebelumnya Rusia mesti berhubungan langsung dengan pemerintah Georgia untuk berkontak langsung dengan dua wilayah ini, pasca kejadian ini, Georgia justru mesti berhubungan dengan Moskow untuk berkontak dengan dua wilayah ini (Asmus, 2010). Selain itu, efek samping dari kasus tersebut secara spesifik mengarah pada negara-negara yang berada di sekitar wilayah Rusia. Nasib yang dialami Georgia bisa terjadi pada negara-negara Baltik, Azerbaijan, Ukraina, Moldova, dan negara-negara di Asia Tengah (Cornell, Popjanevski and Nilsson, 2008).

Pada tahun 2014, setelah Georgia, giliran Ukraina yang mesti berhadapan langsung dengan Rusia. Sama seperti Georgia, aneksasi Ukraina oleh Rusia mempunyai akar sejarah yang panjang. Sejarah ini juga diwarnai dengan dominasi Rusia terhadap Ukraina (Kofman et al., 2017). Preseden kejadian paling dekat dalam proses aneksasi ini mulai terjadi ketika

Ukraina mengalami krisis internal (Fisher, 2021). Krisis internal ini mengarah pada penolakan dan permintaan pengunduran diri presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovich. Hal ini disebabkan oleh keputusannya untuk tidak bergabung dengan Uni Eropa.

Sejak Februari 2014, Ukraina dan Rusia telah mulai mempersiapkan diri dengan menyebar tentara dan juga persenjataan di wilayah Crimea (Kofman *et al.*, 2017). Secara komparatif, kekuatan tempur Ukraina jauh lebih banyak dibanding Rusia saat itu. Ukraina menurunkan 18.800 personel dan persenjataan lainnya. Sementara itu, jumlah tentara yang diturunkan Rusia hanya 12.000. Pada bulan yang sama juga, protes Euro-Maidan juga terjadi di Kiev dan membuat keadaan semakin genting (Kofman *et al.*, 2017). Di akhir bulan Februari, dimulai dari tanggal 22 sampai 28, Rusia sukses menjalankan operasi militer dan mampu menyudutkan tentara Ukraina meski dengan kekuatan tempur yang jauh lebih kecil (Pynnoiemi and Racz, 2016). Setelah itu, parlemen Crimea mulai merencanakan referendum dan hasilnya menunjukkan keinginan mayoritas masyarakat Crimea untuk lepas dari Ukraina (Kofman *et al.*, 2017). Tak lama berselang, parlemen Crimea juga mengajukan proposal untuk menjadi salah satu negara federal dari Rusia dan disetujui oleh Rusia setelahnya (Harding and Walker, 2014). Pada akhirnya, di tanggal 26 Maret 2014, Rusia telah berhasil menganeksasi Crimea dan mulai memulangkan pasukan dan persenjataannya (Kofman *et al.*, 2017).

Aneksasi di tahun 2014 tersebut mempunyai konsekuensi yang cukup serius dan masih akan berlangsung cukup lama untuk Ukraina. Pada bidang ekonomi, Ukraina mesti dengan segera menghindari kebangkrutan negara (Olszan and Wierzbowska-Miazga, 2014). Sebab, pasokan gas murah dan ketergantungan Ukraina terhadap pinjaman Rusia mesti dihentikan sama sekali. Di sisi lain, pada konteks politik domestik, Ukraina mengalami kemunduran dari segi kedaulatan dan karenanya wacana politik dominan adalah bagaimana merestorasi legitimasi politik internal dan menjadi negara berdaulat yang bebas dari intervensi Rusia (Lozada *et al.*, 2014).

Konsekuensi-konsekuensi tersebut membuat Ukraina, yang sebelumnya telah semakin condong ke Eropa dan Amerika, membutuhkan bantuan Eropa dan Amerika baik dari segi ekonomi maupun keamanan (Lozada *et al.*, 2014; Olszan and Wierzbowska-Miazga, 2014). Secara lebih spesifik, ini mengarah pada keanggotaan Ukraina pada Uni Eropa maupun NATO. Di sisi lain, sentimen anti-Rusia di Ukraina juga semakin berkembang (Bilefsky, Nagourney and Perez-Pefia, 2022). Merespon sentimen ini, Rusia tetap menempatkan tentara dan persenjataannya di perbatasan wilayah Timur Ukraina.

Di bulan April 2014, sekitar 40.000 tentara Rusia berkumpul di perbatasan wilayah Timur di Ukraina (Sullivan, 2022). Di bulan yang sama juga, dengan bantuan Rusia, gerakan separatis di Donetsk dan Luhansk menyatakan kemerdekaannya dari Ukraina (Sullivan, 2022). Kejadian ini dengan demikian menjadi keberlanjutan dari intervensi Rusia terhadap Ukraina.

Pada tahun 2019, presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang baru terpilih berjanji untuk segera mengakhiri ketegangan dengan Rusia. (Sullivan, 2022). Untuk itu, di tahun 2020, Zelenskyy semakin mendekati diri ke Amerika dan ingin mempercepat masuknya Ukraina sebagai anggota Uni Eropa. Ini kemudian menghasilkan beberapa bantuan ekonomi maupun militer, seperti pembangunan misil jarak menengah dan penempatan beberapa ribu pasukan Amerika di wilayah Ukraina (Nandito, 2022). Di akhir tahun 2020, merespon hal ini, Putin telah mengeluarkan ultimatum ke Amerika untuk menghentikan bantuan militer tersebut.

Pada awal tahun 2022, situasi semakin memanas. Laporan CSIS bahkan telah mengajukan besarnya kemungkinan Rusia untuk mengintervensi Ukraina (Wasielewski and G.Jones, 2022). Di bulan Februari, kelompok separatis mulai melakukan kontak senjata dengan tentara Ukraina di wilayah Donetsk dan Luhansk (Sullivan, 2022). Pada tanggal 24 Februari, Rusia bahkan telah melancarkan serangan destruktif ke wilayah Ukraina. Beriringan dengan itu, Rusia juga menegaskan bahwa untuk menghentikan perang ini, penghentian ekspansi NATO dan pelucutan senjata nuklir Amerika dari Eropa adalah hal yang mesti dipenuhi. Pada ujungnya, ini semua secara spesifik mengarah pada jaminan eksklusif wilayah Eropa Timur untuk Rusia semata/*sphere of influence* (Wasielewski and G.Jones, 2022). Tanpa jaminan tersebut, Rusia akan tetap menggunakan kekuatan militer untuk melindungi keamanannya sebagai negara (*security interests*).

Dua fenomena yang telah dijelaskan di muka kerap disebut sebagai manuver Rusia untuk kembali berperan banyak dalam kancah politik internasional sebagai negara besar/*the return of great power* (Maja and Mankoff, 2013). Pada konteks akademik, dalam merespon hal tersebut, kebanyakan analisis berpusat pada aspek-aspek krusial yang menyebabkan manuver Rusia di Eropa Timur bisa terjadi. Dalam menjelaskan hal tersebut, pendekatan realisme, marxisme, maupun konstruktivisme memberi suatu jawaban dengan aksentuasinya masing-masing (Kuzio and D'Anieri, 2018). Pendekatan realisme menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan tindakan Rusia sebagai tindakan defensif atau ofensif terhadap ekspansi NATO dan Uni Eropa (Mearsheimer, 2014; Oktaviano, 2015; D'Anieri, 2016). Dalam penjelasan yang lebih struktural, realisme mewacanakan sifat anarki dunia internasional dan kecenderungan penyeimbangan kekuatan di antara negara-negara besar/*balance of power*. Di sisi lain, pendekatan Marxisme, yang diajukan oleh Richard Sakwa, mengajukan jawaban dari tindakan Rusia ini sebagai konsekuensi logis dari ekspansi imperialis NATO, Amerika, dan juga Uni Eropa (Steele, 2015; Deller, 2016; Kuzio and D'Anieri, 2018). Kedua pendekatan ini kemudian secara implisit mengajukan jawaban **eksternal** atau **struktural internasional** terhadap pertanyaan mengapa Rusia melakukan intervensi militer di wilayah Eropa Timur. Di samping itu, keduanya sama-sama tidak mengajukan kalkulasi krusial terhadap faktor domestik Rusia.

Sementara itu, pendekatan konstruktivisme mengajukan peran identitas, prestise, dan persepsi pemimpin Rusia dalam mengambil kebijakan (Kuzio and D'Anieri, 2018;

Sudibyo, 2018; Widiassa, 2018). Jawaban yang kemudian diajukan cenderung berpusat pada penjelasan terkait kondisi internal Rusia dan peran pemimpin dalam memutuskan kebijakan. Pada konteks lain, dalam usaha yang lebih jauh, riset lain juga berusaha menggabungkan dua pendekatan, yaitu realisme dan konstruktivisme. Riset ini mengajukan bagaimana peran isu keamanan, *power*, persepsi, prestise, dan harga diri punya kait kelindan dan berpengaruh terhadap tindakan Rusia dalam melakukan intervensi (Tsygankov, 2009).

Riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya ini masing-masing menawarkan suatu penjelasan yang mempunyai signifikansinya masing-masing. Meski demikian, pada titik tertentu, dalam paparan ringkas riset terdahulu ini, aksentuasi masing-masing riset cenderung parsial. Ada yang menekankan signifikansi struktur/logika anarki dunia internasional. Ada yang menekankan signifikansi agen dalam mengambil keputusan. Usaha melampaui ini paling tidak telah dimulai dari riset Tsygankov yang menggabungkan pendekatan realisme dan konstruktivisme.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan berusaha menganalisis signifikansi struktur dan aktor dalam menjelaskan manuver politik luar negeri Rusia. Penulis akan menggunakan pendekatan Marxisme dalam melakukan hal ini. Meski dalam paparan sebelumnya pendekatan Marxisme memberi kesan yang juga parsial, dalam penelitian ini penulis berusaha mengajukan suatu tawaran pendekatan Marxisme yang bisa mengakomodir peran struktur maupun aktor dalam kebijakan luar negeri Rusia. Untuk mempersempit fokus pula,

kebijakan luar negeri Rusia di sini hanya akan dianalisis dalam relasinya dengan Ukraina di tahun 2014 sampai dengan 2022.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diajukan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana signifikansi struktur/dunia internasional terhadap kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina sejak 2014-2022 dalam perspektif Marxis?
2. Bagaimana analisis Marxis memosisikan signifikansi aktor berikut proses domestiknya terhadap kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina sejak 2014-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui deskripsi analisis Marxis terkait signifikansi struktur/dunia internasional terhadap kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina sejak tahun 2014 sampai 2022.
2. Mengetahui deskripsi analisis Marxis terkait signifikansi aktor berikut proses domestiknya terhadap kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina sejak tahun 2014 sampai 2022.

Adapun manfaat dari penelitian akan mengarah dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan juga manfaat operasional. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap analisis kebijakan luar negeri dari perspektif Marxis. Sementara itu, secara spesifik, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap kajian kebijakan luar negeri Rusia kontemporer. Pada ujungnya, manfaat teoretis ini juga diharapkan berguna untuk dunia akademik, baik untuk mahasiswa, dosen, maupun peneliti HI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih sekaligus referensi bagi pengambil kebijakan, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam mengambil kebijakan luar negeri.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan bagan kerangka konseptual di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan Marxisme dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Secara ringkas,

pendekatan Marxisme akan dipakai untuk menganalisis kondisi internasional dan domestik apa saja yang berkontribusi terhadap kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina di tahun 2014 sampai tahun 2022. Dalam hal ini, metode materiliasme historis Marxian akan menjadi jangkar dari penjelasan berikut kerangka konseptual penelitian ini. Secara ringkas ini berarti analisis historis terhadap proses pembentukan faktor-faktor yang potensial terhadap kebijakan luar negeri Rusia adalah hal utama yang akan ditonjolkan. Secara lebih detail, hal ini akan dipaparkan bagian berikut.

1. Marxisme dan Analisis Kebijakan Luar Negeri

Studi analisis kebijakan luar negeri (selanjutnya disebut FPA/ *Foreign Policy Analysis*) adalah studi yang sifatnya spesifik dan merupakan turunan dari teori HI yang sifatnya *grand* (Hara, 2011). Sebab itu, konsep-konsep yang ada dalam studi ini pada hakikatnya adalah *middle-range theory* dan berfungsi untuk menganalisis suatu situasi khusus (Hara, 2011). Dalam perkembangannya, FPA berfokus pada analisis terhadap perilaku dan tindakan negara (Neack, 2008). Secara spesifik, ini juga akan menjurus ke pertanyaan **bagaimana, mengapa, dan untuk apa** suatu negara berperilaku dan bertindak secara selektif (Neack, 2008). Dengan spesifikasi pertanyaan seperti ini, maka studi FPA secara langsung menempatkan peran ‘agen’ dan ‘proses pengambilan kebijakan’ sebagai suatu aktivitas sentral dalam kebijakan luar negeri.

Secara mendasar, setiap kebijakan luar negeri suatu negara bertujuan untuk mempengaruhi tindakan negara lain atau sistem internasional secara keseluruhan. Pada

praktiknya, hal tersebut termanifestasi dalam instrumen-instrumen kebijakan luar negeri seperti **sosialisasi**, **koersi**, dan **intervensi** (Morin and Paquin, 2018). *‘Sosialisasi’* merujuk pada transfer keyakinan, ide, atau nilai dari suatu negara ke negara lainnya. *‘Koersi’* merupakan suatu jenis instrumen kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan suatu negara tanpa secara langsung mengintervensi negara tersebut. Sementara itu, *‘intervensi’* merupakan manuver langsung suatu negara terhadap negara lain yang bertujuan untuk mengubah politik domestik suatu negara secara struktural (Morin and Paquin, 2018)

Pada proses dan kelanjutannya, studi FPA juga mengembangkan level analisis, sistem internasional, negara, individu, politik domestik, dll, sebagai usaha untuk menempatkan negara tidak di dalam ruang kosong (Neack, 2008, 2014). Meski begitu, kebanyakan studi FPA sering memilih salah satu level analisis sebagai titik berangkat dalam menganalisis. Dalam perkembangan lebih lanjut, penggabungan analisis dan penjelasan dari berbagai level analisis kemudian semakin dikembangkan dan menjadi ciri dari studi FPA (Breuning, 2007; Hudson and Day, 2014). Hal ini berasal dari dorongan untuk mengembangkan FPA sebagai sebuah studi yang mampu menjelaskan dan memprediksi tindakan negara-negara (Hudson and Day, 2014).

Dalam kaitannya dengan level analisis yang telah diajukan di muka, kontribusi *grand theory* HI dapat dikatakan signifikan. Meski tidak memberi suatu panduan spesifik dalam studi FPA, teori-teori tersebut berperan besar dalam memberikan asumsi serta

penjelasan terkait bagaimana ‘_dunia internasional’ bekerja (Neack, 2014). Kontribusi tersebut secara spesifik mempengaruhi studi-studi FPA dalam kaitannya dengan melihat ‘_apa yang penting untuk dikaji’/**asumsi**, bagaimana ‘_dunia internasional mempengaruhi kebijakan suatu negara’/**struktur**, dan ‘_tujuan seperti apa yang hendak dicapai suatu negara’ (Neack, 2008).

Dalam penelitian ini, Marxisme (selanjutnya disebut MIRT/*Marxist International Relations Theory*) digunakan sebagai *grand theory* yang akan memberi corak spesifik dalam FPA. Pada konteks tersebut, empat prinsip penting MIRT yang membedakannya dengan berbagai pendekatan HI lainnya akan diajukan (Anievas, 2010). **Pertama**, MIRT berkomitmen terhadap usaha membongkar kategori-kategori mendasar dan yang tidak pernah dipertanyakan dalam HI, yaitu sistem internasional berikut sifat anarkinya, *balance of power*, dan dunia internasional itu sendiri. Ini mensyaratkan penjelasan historis sekaligus sosiologis terhadap apa-apa yang dianggap ada begitu saja dalam ilmu HI. **Kedua**, sebagai konsekuensi logis dari usaha yang pertama, MIRT mensyaratkan suatu pendekatan holistik dalam menjelaskan fenomena. Ini terepresentasi dalam asumsi Marxian yang menganggap bahwa komponen agen dan struktur dalam HI mencakup banyak hal, mulai dari kelas, ideologi, dorongan pasar, identitas, dan norma. Kesemua komponen ini saling terhubung dalam level global maupun transnasional. **Ketiga**, MIRT berusaha untuk menganalisis fenomena sosial berikut relasi esensialnya. Ini secara langsung juga menekankan ciri *realisme kritis* dari MIRT. Ciri *realisme kritis* juga menempatkan MIRT tidak terjebak

dalam positivisme dan empirisisme (Suryajaya, 2014). **Keempat**, MIRT tidak hanya berusaha menjelaskan dunia, tetapi lebih jauh mengubahnya. Keempat ciri ini, jika diringkas, akan menyetengahkan ciri **historisisme**, **realisme kritis**, **holisme metodologis**, dan **praksis** dari MIRT (Anievas, 2010).

Berangkat dari ciri pendekatan Marxian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan dua logika plural, meminjam istilah John M. Hobson, sebagai corak pendekatan yang akan mewarnai analisis kebijakan luar negeri Rusia (Hobson, 2010). Teorisi yang mula-mula mencetuskan pendekatan adalah Giovanni Arrighi, David Harvey, lalu kemudian dikembangkan oleh Callinicos (Anievas, 2010; Hobson, 2010; Alvian, 2016). Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan logika macam apa yang menggerakkan dunia internasional. Dalam menjelaskan ini, pendekatan ini menyetengahkan dua logika kompetitif yang bergerak dan saling terhubung, tapi tidak bisa direduksi satu sama lain, secara historis (Callinicos, 2007; Harvey, 2010; Alvian, 2016). Dua logika ini adalah logika kapitalisme dan logika geopolitik sistemik dari sistem antar-negara/*interstate system*. Logika kapitalisme dicirikan dengan akumulasi kapital, sedangkan logika geopolitik dicirikan dengan akumulasi teritorial negara untuk memperbesar dan mempertahankan kekuasaan politiknya (Harvey, 2010; Setyaka, 2013). Pada tataran praktis dan empirik, masing-masing logika ini direpresentasikan dengan kelas kapitalis berikut strategi-strategi ekonominya dan juga pejabat negara/politisi/*statesmen* serta strategi politik, militer dan diplomasinya (Setyaka, 2013).

Kelahiran pendekatan ini secara mendasar merupakan usaha pelampauan terhadap pendekatan aliran Marxisme klasik dalam HI, Wallerstein, Gunderfrank, dan Prebisch, yang dianggap terlalu ekonomi deterministik dalam melihat dunia internasional (Hobson, 2010). Pendekatan ini lantas menentang pentingnya suatu penempatan analitik terhadap independensi logika teritorial dari sistem antar-negara. Implikasi dari hal ini secara spesifik mengarah pada argumentasi Alex Callinicos soal mungkin pendekatan realisme dipakai dalam analisis Marxian.

*One of implication of this point is that there is, necessarily, a **realist moment** in any Marxist analysis of international relations and conjunctures: in other words, any such analysis must take into account **the strategies, calculations, and interactions of rival political elites in the state system.**(Callinicos, 2007)*

Meski begitu, dalam beberapa pokok persoalan, seperti pembacaan Hobson terhadap Callinicos dan bahkan komentar Callinicos sendiri (Callinicos, 2007; Hobson, 2010), logika kapitalistik masih tetap berpengaruh dan dalam konteks tertentu dan secara signifikan mengondisikan logika geopolitik. Karenanya, alih-alih menyematkan suatu otonomi penuh terhadap logika geopolitik, Hobson mengajukan adanya suatu otonomi parsial dari logika geopolitik ini (Hobson, 2010). Otonomi parsial ini misalnya dapat direpresentasikan secara materiil dalam konteks kepentingan para politisi suatu negara dan kepentingan para kapitalis. Para politisi ini mungkin saja punya kepentingan yang spesifik dan bertentangan dengan suatu kelompok kapitalis tertentu, tetapi ia sama sekali tidak bisa punya kepentingan yang bertentangan sama sekali dengan kelas kapitalis secara keseluruhan dan dalam jangka panjang (Davidson, 2010, 2012). Sebab, secara materiil, di

dalam sistem kapitalisme ini, keberlangsungan hidup suatu negara berikut jajaran stafnya bergantung pada pendapatan nasional yang secara keseluruhan bersumber dari kelas kapitalis secara keseluruhan (Davidson, 2010). Di sisi lain, kelas kapitalis juga memerlukan negara untuk melakukan akumulasi kapital ke dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini, relasi negara dan kelas kapitalis secara umum adalah kumpulan relasi yang sifatnya mutual suportif (Davidson, 2012).

Konsekuensi logis dari penggunaan pendekatan dua logika plural pada FPA akan mengarah pada pentingnya menganalisis peran dua logika sistemik ini berikut representasinya sebagai aktor-aktor signifikan dalam analisis kebijakan luar negeri. Jika dikontekstualisasikan dalam level analisis yang menjadi ciri studi FPA, maka logika kapitalisme dan geopolitik akan dilihat signifikansinya pada level internasional, domestik, maupun aktor spesifik. Secara internasional, alih-alih mengetengahkan logika tunggal anarki, pendekatan Marxis dalam penelitian ini mengajukan logika kapitalisme sebagai logika yang turut berkontribusi terhadap kondisi dunia internasional dan bahkan mengondisikan logika anarki. Representasi akan ciri logika ini akan mengetengahkan suatu kondisi internasional yang jauh berbeda dengan dunia ‘anarki’ versi realisme. Sementara itu, dalam konteks domestik dan aktor spesifik, karena dua logika plural mengakomodasi signifikansi kelas kapitalis maupun elit politik (*statesmen*) dalam pengambilan keputusan suatu negara, maka signifikansi kedua aktor berikut relasi di antara keduanya diasumsikan sebagai motor penggerak dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu

negara. Adapun signifikansi kedua aktor ini berikut relasinya adalah historis sifatnya dan terkondisikan secara struktural oleh perkembangan spesifik kapitalisme suatu negara.

Berangkat dari penjelasan kerangka konseptual yang telah diajukan di muka, maka dapat dipastikan bahwa setidaknya kerangka konseptual penelitian ini berdampak pada tiga alat konseptual penting yang mengarah pada tiga level analisis, yaitu dunia internasional, kondisi domestik suatu negara, dan juga signifikansi aktor dalam kebijakan luar negeri. Masing-masing alat analisis ini akan dipaparkan secara lebih perinci dalam bab tinjauan pustaka penelitian ini. Masing-masing alat analisis ini dipinjam dari beberapa pemikiran teoretisi Marxis kontemporer yang cukup berbeda terkait tiga level analisis ini. Meski begitu hal tersebut tetap bisa disatukan karena masing-masing alat analisis memegang asumsi yang sama dengan pendekatan analitik penelitian ini. Kesemuanya berasumsi bahwa negara mempunyai suatu otonomi berikut logikanya yang bersifat parsial terhadap sistem kapitalisme. Adapun paparan lebih spesifik terhadap hal-hal ini akan diajukan di bab tinjauan pustaka penelitian ini. Penelitian ini juga akan mengajukan suatu tinjauan kritis terhadap pendekatan teoretis dominan HI yang berusaha menjelaskan kasus yang sama. Hal ini akan berkontribusi terhadap legitimasi penggunaan pendekatan Marxis sebagai pisau analisis dalam kasus Rusia-Ukraina.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam studi HI, metode penelitian ini berfokus pada analisis kejadian spesifik dan berusaha untuk menemukan hubungan kausal antara variabel dependen dan independen (Gonzales-Ocantor, 2020). Untuk melakukan ini, penelitian kualitatif mesti melakukan penelusuran terhadap proses historis, sosiologis, maupun politis dari kejadian yang berusaha diteliti. Karena itu, penelitian ini mengandalkan banyak sumber spesifik kontekstual (Gonzales-Ocantor, 2020).

Dalam kaitannya dengan penjelasan di muka, penelitian ini ingin secara lebih spesifik menggunakan salah satu bentuk dari metode penelitian kualitatif, yaitu studi kasus. Penggunaan studi kasus sebagai metode penelitian di sini bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa kasus spesifik dengan ambisi untuk memahami dan mengajukan penjelasan yang general atas suatu kejadian berikut dinamika-dinamika spesifik dari kejadian tersebut (Ruffa, 2020). Lebih lanjut, meski berfokus pada kasus spesifik, studi kasus juga mesti memastikan bahwa penjelasan atas suatu kasus juga dapat diajukan sebagai penjelasan di kasus lain yang kurang lebih serupa (baik itu sebagai pisau analisis atau sebagai mekanisme kausal (Lamont, 2015).

Berkaitan dengan kesemua hal tersebut, dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini berusaha menganalisis satu kasus spesifik, yaitu kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina dari tahun 2014 sampai 2022. Analisis terhadap kasus ini dengan demikian mensyaratkan suatu analisis historis, sosiologis, dan politis terhadap hal-hal yang mengondisikan kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina.

2. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Sejalan dengan jenis penelitian yang diajukan sebelumnya, maka metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelacakan proses kausal/*process-tracing*, selanjutnya disebut PT (Lamont, 2015). PT bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan **kausalitas** berikut **mekanisme hubungan** antara variabel dependen dan variabel independen (Gonzales-Ocantor, 2020). Penentuan variabel dependen dan independen di sini secara langsung dikondisikan oleh penggunaan teoretis dari suatu penelitian. Untuk itu, PT secara langsung ingin menguji hipotesis yang diasumsikan suatu pendekatan teoretis. Dalam konteks penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan Marxisme dan realisme, maka variabel yang berusaha ditunjukkan keterhubungannya adalah **perkembangan kapitalisme secara internasional maupun domestik** terhadap **kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina di tahun 2014-2022**. Mencari keterhubungan di antara dua variabel ini mesti diartikan dalam dua hal, yaitu 1.) hubungan kausalitas yang secara spesifik akan menjadi kondisi material dari mungkinnya suatu kejadian bisa terjadi (struktur) dan 2.) mekanisme aktor/elit politik spesifik yang beroperasi dalam struktur dan menghasilkan suatu kejadian spesifik (Gonzales-Ocantor, 2020)

Lebih lanjut, dengan penyempitan fokus tersebut, maka pengumpulan data akan menjadi lebih terarah dan spesifik. Data-data yang mesti dicari dengan demikian adalah

data-data historis sosiologis terhadap perkembangan kapitalisme dan perkembangan elit politik di Rusia. Adapun berkaitan dengan hal ini, maka pengelompokan data primer dan sekunder perlu diajukan. Data primer di sini utamanya berkaitan dengan dokumen resmi kenegaraan dari Rusia terkait intervensi militer, laman berita TASS atau RIA Novosti (media milik negara), dan hasil wawancara terhadap beberapa elit politik Rusia. Pemilihan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dilandaskan pada asumsi bahwa kedua referensi tersebut merupakan representasi dari beberapa hal, yaitu hasil keputusan elit politik Rusia dan wacana yang melegitimasi tindakan Rusia. Sementara itu, sebagai pembanding dan pelengkap, data sekunder akan berkaitan dengan jurnal internasional, buku, laman berita kredibel, hasil penelitian, atau laporan penelitian dari lembaga *think tank* yang berkaitan dengan analisis terhadap perkembangan kapitalisme di Rusia dan intervensi militer Rusia.

3. Tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan topik, pertanyaan penelitian, dan pendekatan yang digunakan
2. Mengumpulkan data-data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian
3. Menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk analisis
4. Menyajikan kesimpulan dari analisis yang telah diajukan sebelumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penjelasan utama akan diarahkan pada dua fokus, yaitu 1.) elaborasi detil terhadap pendekatan dua logika plural berikut kontekstualisasinya pada analisis kebijakan luar negeri dan 2.) posisi spesifik penelitian ini dalam keseluruhan penelitian yang telah mengkaji kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraine sejak 2014-2022. Pada bagian ini, sub bab pertama akan terdiri dari dua paparan yang mencakup penjelasan terkait definisi konseptual maupun operasional dari pendekatan dua logika plural. Sementara itu, sub-bab kedua akan menjadi paparan yang memosisikan *state of the art* dari penelitian ini. Adapun keseluruhan elaborasi ini akan diajukan dalam beberapa sub bab berikut.

A. Pendekatan Dua Logika Plural dan Analisis Kebijakan Luar Negeri

Pendekatan dua logika plural adalah pendekatan yang menyetengahkan dua logika sistemik utama yang ada dalam realitas dunia internasional. Dua logika tersebut adalah logika teritorial dan logika kapitalisme. Dua logika ini terrepresentasi dalam aktor bernama elit politik (logika teritorial) dan kelas kapitalis (logika kapitalisme). Jika logika teritorial menyetengahkan dorongan untuk melakukan akumulasi politik dan teritori, logika kapitalisme menyetengahkan akumulasi kapital sebagai dorongan sistemik utama.

Relasi di antara keduanya dapat dikategorikan sebagai relasi yang terstratifikasi. Dalam konteks ini, logika sistemik kapitalisme berada di dasar paling bawah (*basis*) dan mengondisikan secara signifikan logika teritorial. Mengatakan hal ini tidak sama artinya dengan mengajukan argumentasi bahwa segala kejadian dalam fenomena logika teritorial

disebabkan oleh logika kapitalistik. Alih-alih demikian, deskripsi yang lebih tepat adalah imajinasi terhadap fenomena logika teritorial tertentu tidak akan mungkin terbayangkan tanpa perkembangan spesifik dari logika kapitalisme tertentu. Dengan kata lain, dari sisi praktikal, tidak mungkin membayangkan manuver elit politik tertentu tanpa mempertimbangkan analisis terhadap perkembangan maupun signifikansi dari kapitalisme dan kelas kapitalis tertentu secara domestik.

Mengajukan argumentasi di muka mempunyai konsekuensi terhadap perubahan mendasar di tataran level analisis dari kebijakan luar negeri suatu negara (internasional, negara, dan juga aktor). **Pertama**, pada tataran sistem internasional, alih-alih menggambarkan dunia internasional sebagai struktur yang digerakkan oleh logika anarki, pendekatan ini menggambarkan dunia internasional sebagai dunia di mana akumulasi berikut ekspansi kapital difasilitasi oleh negara. Sejak analisis Marxis mempunyai ciri historis yang kuat, maka wajah dunia internasional tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Dunia internasional pada masa tertentu bisa saja berbeda keadaannya pada masa yang lain. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, merunut pada dua logika plural yang telah diajukan di muka, penelitian ini, meminjam teorisasi Peter Gowan terhadap kondisi dunia internasional sejak perang dingin sampai saat ini, menggambarkan dunia internasional saat ini dalam kenyataan imperialisme Amerika. **Kedua**, peran negara sebagai fasilitator ekspansi kapital tidak berarti mendudukan negara sebagai kapitalistik secara inheren. Alih-alih demikian, negara adalah suatu medan perebutan ruang yang diperebutkan oleh

berbagai kekuatan sosial secara domestik dalam negara tersebut. Untuk itu, bentuk spesifik dari suatu negara sudah selalu merupakan hasil dari proses konflikual ini serentak representasi dari kemenangan suatu kekuatan sosial tertentu. Kemenangan ini diiringi pula oleh legitimasi ideologis terhadap posisi dominan kekuatan sosial tertentu dalam menguasai negara. Teorisi Bob Jessop soal negara di sini akan menjadi konseptualisasi utama yang bisa mengakomodir penjelasan di muka. **Ketiga**, sebagai konsekuensi logis dari pendekatan dua logika plural pula dan konseptualisasi negara sebagai medan perebutan kekuasaan, maka aktor utama dalam pengambilan kebijakan dari negara adalah elit politik dan juga kelas kapitalis. Hal ini diajukan karena kedua aktor ini mempunyai kekuatan yang signifikan dalam melakukan penetrasi terhadap negara. Relasi keduanya secara general adalah relasi mutual-suportif, tetapi bukan tanpa konflik. Penyatuan dua kepentingan antara dua aktor ini bersifat relatif dan khas secara historis. Oleh karenanya, bagaimana signifikansi kedua aktor dalam pengambilan keputusan pada suatu negara mesti dianalisis secara historis pula. Untuk ini, teorisi Marxian soal relasi di antara keduanya akan berfungsi signifikan sebagai pisau analisis nantinya

Masing-masing konseptualisasi yang telah diajukan di muka dipilih karena mengandung asumsi yang sama dengan pendekatan dua logika plural yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu **negara (berikut jajaran elit politiknya) mempunyai independensi yang sifatnya parsial terhadap logika sistemik kapitalisme**. Lebih lanjut,

setelah memaparkan paparan konseptualisasi secara keseluruhan, masing-masing konsep tersebut akan dijabarkan secara operasional untuk menganalisis kasus Rusia-Ukraina.

1. Dunia Internasional sebagai Imperialisme Amerika

Konseptualisasi terkait ‘dunia internasional’ yang diajukan oleh Peter Gowan cukup kompleks. Secara general, Gowan mengajukan argumentasi bahwa realitas ‘dunia internasional’ pasca Perang Dunia II adalah realitas imperialisme Amerika Serikat secara global. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, proses serta proyek imperialisme Amerika telah dirancang (Sakellaropoulos and Sotiris, 2009). Di sini, usaha dominasi Amerika mesti dipahami sebagai usaha ekspansi kapital kelas kapitalis Amerika ke dunia internasional yang difasilitasi oleh negara (Gowan, 2009b). Untuk itu, dorongan utama untuk melakukan dominasi bukan didorong oleh kondisi anarki berikut fitur-fitur *survival* suatu negara besar, tetapi lebih jauh merupakan konsekuensi struktural dari perkembangan kapitalisme Amerika berikut dorongan strukturalnya untuk melakukan ekspansi kapital secara global (Gowan, 2009b). Lebih lanjut, pada tataran praktis, imperialisme Amerika, berbeda dengan Inggris sebagai negara kapitalis hegemon sebelumnya, tetap mempertahankan pluralitas negara sekaligus otonomi masing-masing negara (Gowan, 2002a). Dengan kata lain, manuver imperial Amerika tetap mempertahankan sistem negara berdaulat Westphalian.

Dalam kelanjutannya, sejak perang dingin, manuver ini semakin terealisasi dengan keberhasilan Amerika dalam melakukan tiga hal, yaitu menciptakan dollar sebagai standar mata uang internasional (rezim dolar wallstreet), membuat negara-negara kapitalis lainnya

bergantung padanya di bidang keamanan/NATO, dan menciptakan suatu nilai universal di mana dunia dapat menerima dominasi Amerika (Pijl, 2003; Gowan, 2004). Dua hal yang terakhir disebutkan saling terkait satu sama lain dan disatukan oleh wacana anti-komunisme Soviet. Ketergantungan negara-negara kapitalis lain dalam hal keamanan berakar pada kemampuan Amerika dalam menangkal semangat anti-kapitalisme Rusia dan juga dominasi industri militer Amerika di antara negara-negara kapitalis lainnya. Sementara itu, nilai universal yang membuat dominasi ini dapat diterima adalah Amerika sebagai representasi demokrasi yang melawan otoritarianisme Rusia alias anti-komunisme.

Dalam perkembangan lebih lanjut, setelah berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, relevansi NATO dan anti-komunisme menghilang. Karenanya, tindak-tanduk Amerika pasca perang dingin oleh Gowan digambarkan sebagai usaha pencarian legitimasi serta relevansi hegemoni dalam ranah politik keamanan (Gowan, 1999b, 2003). Pada ujungnya, ini mengarah pada usaha Amerika untuk membuat suatu jenis struktur ketergantungan baru terhadap Amerika (Gulick, 2004; Gowan, 2006). Manuver Amerika di Timur Tengah adalah representasi dari keadaan ini. Intervensi Amerika ke Timur Tengah merupakan dorongan untuk menguasai cadangan minyak terbesar dunia. Penguasaan ini begitu vital untuk negara-negara kapitalis maju di Eropa Barat maupun Asia Timur dan memiliki posisi penting dalam keamanan politis dan militer bagi Rusia, Tiongkok, dan juga negara-negara Eropa lainnya (Gowan, 2003, 2006). Beriringan dengan itu, untuk menciptakan suatu nilai universal yang bisa melegitimasi ini, Amerika mulai melakukan

usaha demonisasi Islam sekaligus memperhadapkan Islam dengan nilai-nilai barat (*western values*) yang dianggap lebih *modern* (Gowan, 2006).

Dominasi dan hegemoni Amerika yang telah diajukan di muka bukannya tanpa problem. Gowan sendiri menjelaskan bahwa—meski dalam kondisi hegemonik—dunia internasional tetap menyimpan konflik yang bersumber pada persoalan struktural dalam sistem politik kapitalistis internasional. Ini utamanya bersumber pada pertarungan di sektor industri teknologi canggih, sistem moneter internasional, dan juga pada konteks politik keamanan negara-negara kapitalis maju (Gowan, 2004, 2010, 2013; Sakellaropoulos and Sotiris, 2009).¹ Dua hal terakhir yang disebutkan merupakan suatu bentuk spesifik konflik internasional saat ini. Sebab ini dikondisikan oleh realisasi dominasi Amerika dalam dunia internasional. Pada prosesnya, tantangan berarti juga mulai muncul dari bangkitnya Tiongkok dan kembalinya Rusia dalam percaturan politik internasional (Gulick, 2004).

Paparan Gowan di muka terkait situasi internasional sekurang-kurangnya memiliki implikasi terhadap beberapa konseptualisasi tertentu. **Pertama**, pada tataran konseptual, *dunia internasional adalah fenomena ekspansi kapital yang difasilitasi oleh negara*. **Kedua**, pada tataran praktikal, sejalan dengan dasar konseptualisasi Gowan, *realitas dunia*

¹ Politik keamanan ini utamanya mengarah pada bagaimana negara-negara kapitalis maju di Eropa sudah mempunyai tendensi untuk membangun kekuatan militernya sendiri dan mulai melepaskan ketergantungannya terhadap Amerika. Secara spesifik ini mengarah pada melepas dominasi NATO dalam sektor keamanan dan manuver ini bisa dilihat dari usaha Uni Eropa untuk melepas NATO atau beberapa negara Eropa Barat lainnya yang berusaha memperkuat kapasitas militernya sendiri. Sementara itu, dalam konteks Asia, ini lebih mengarah pada usaha Jepang untuk menjalin kerja sama dengan Tiongkok. Kedekatan kedua negara ini kemudian menjadi perhatian Amerika dan bahkan beberapa manuver Amerika berusaha untuk menggagalkan kerja sama kedua negara ini.

internasional saat ini adalah realitas imperialisme Amerika berikut segala ciri distingtifnya'. Dua hal tersebut punya konsekuensi langsung pula terhadap kondisi struktural yang mengondisikan tindakan Rusia terhadap Ukraina. Dalam artian ini, penelitian ini mendudukan ekspansi NATO dan negara-negara Barat ke Eropa Timur, alih-alih digerakkan oleh logika anarki atau promosi demokrasi, pada tempat pertama adalah dorongan struktural perkembangan kapitalisme negara-negara Barat dan manuver imperialisme Amerika. Deskripsi lebih lanjut terhadap hal-hal ini akan dipaparkan di bab empat.

2. Pendekatan Strategis-Relasional terhadap Negara

Pada tataran domestik, konseptualisasi negara Marxis yang digunakan berasal dari pendekatan **strategis relasional** yang diajukan oleh Bob Jessop. Teorisi Bob Jessop soal negara berkaitan erat dengan posisi salah satu teorisi negara Marxian yang diajukan oleh Nicos Poulantzas (Sangadji, 2011). Dalam artian ini, ia mengafirmasi beberapa formulasi Poulantzas soal negara sekaligus juga mengembangkan formulasinya sendiri. Jessop mengutip Poulantzas dalam mendefinisikan negara. Menurut Poulantzas, negara pertamanya, layaknya kapital, mesti diperlakukan sebagai suatu **relasi sosial**. Untuk itu, Poulantzas sama sekali menolak pandangan yang mengatakan bahwa negara adalah suatu entitas yang memiliki kualitas spesifik terberi, baik itu sebagai instrumen patuh kelas tertentu maupun subjek yang sama sekali rasional (Jessop, 2011). Alih-alih demikian, Poulantzas mendefinisikan negara sebagai,

....a relationship of forces, or precisely the material condensation of such a relationship among classes and relationship, such as this is expressed within the state in a necessarily specific form... (Jessop, 2011)

Dengan definisi semacam ini, Poulantzas menempatkan negara berikut bentuk dan segala institusi yang ada di dalamnya tidaklah terberi dan merupakan hasil dari konflik antar kelompok sosial di masa lampau serta akan terus direproduksi (maupun ditransformasi nantinya) melalui konflik antar kelompok sosial pula (Jessop, 2011, 2016). Karenanya, pada pengertian ini, negara sudah selalu merupakan ruang strategis yang menjadi **medan perebutan** antara berbagai kepentingan kelompok sosial maupun fraksi dalam kelompok sosial tertentu. Sebagai catatan, ruang strategis di sini bukanlah suatu ruang netral di mana setiap kelas ataupun fraksi dalam kelas tertentu bisa merebut atau mengakses ruang tersebut dengan mudah. Alih-alih demikian, bentuk negara dan segala institusinya yang terbentuk berdasarkan proses historis tertentu itu sudah selalu menciptakan hambatan-hambatan struktural yang disebut Jessop sebagai *structural selectivity* (Jessop, 1999; Jessop and Morgan, 2022). Pada konteks ini, negara dan akses terhadapnya akan selalu menjadi struktur yang memberi keistimewaan terhadap aktor, identitas, strategi, ruang atau waktu, dan tindakan spesifik tertentu untuk bisa dilakukan (Jessop and Morgan, 2022).

Dengan definisi semacam itu, dalam menjelaskan negara sebagai suatu *‘negara kapitalis’*, Poulantzas menekankan pentingnya suatu analisis terhadap konteks historis dan spasial dari terbentuknya suatu *‘negara kapitalis’*. Meski secara prinsipil, setiap negara

telah menjadi kapitalis, dalam artian adanya pemisahan tegas antara aktivitas ekonomi dan politik alias antara pasar dan negara (Jessop, 2016), ciri spesifik masing-masing negara dan perkembangan kapitalismenya tetaplah ada.

Adapun dalam prosesnya, perkembangan spesifikasi kapitalisme masing-masing negara dipengaruhi oleh faktor internasional maupun domestik masing-masing negara. Pada konteks ini, Bob Jessop mengajukan konsep **strategi akumulasi** dan **proyek hegemonik** sebagai konsep analitik yang bisa menganalisis perkembangan kapitalisme di masing-masing negara (Jessop, 1983). Dua konsep ini berangkat dari asumsi bahwa dalam kelas kapitalis sendiri, meski secara keseluruhan menginginkan adanya kondisi materiil yang kondusif untuk melakukan akumulasi kapital, terdapat kepentingan spesifik yang berbeda, bahkan kerap kali konfliktual, di antara fraksi-fraksi dalam kelas kapitalis sendiri dalam melakukan akumulasi kapital (Jessop, 1983).

Berangkat dari asumsi tersebut, Jessop mendefinisikan **strategi akumulasi** sebagai suatu bentuk spesifik dari ‘_model pertumbuhan ekonomi’ tertentu yang dilengkapi dengan variasi pengondisian dari faktor ekstra-ekonomi tertentu (Jessop, 1983). Penerapan suatu strategi akumulasi tertentu dalam suatu negara sudah selalu merupakan representasi dari menangnya suatu kepentingan spesifik tertentu dari suatu fraksi kelas dalam masyarakat. Dalam prosesnya, ini bahkan bisa terinternasionalisasi dan membentuk penerapan strategi akumulasi di negara-negara lain (Borch and Wosnitzer, 2020). Meski begitu, dalam praktiknya, selalu ada proses kontekstualisasi strategi akumulasi di setiap negara. Contoh

paling nyata dari strategi akumulasi ini dapat dirujuk pada model sistem kapitalis Fordis, pasca-Fordis, maupun neoliberalisme. Masing-masing strategi akumulasi ini mempunyai spesifikasi ‘model pertumbuhan’ ekonominya berikut hal-hal ekstra-ekonomi tertentu yang melekat padanya (Jessop, 1993, 1996). Penerapannya di masing-masing negara juga mengalami kontekstualisasi di setiap negara dan karenanya keberagaman model kapitalisme, dari Fordis sampai neoliberalisme, cukup banyak tergantung proses historis spesifik dari negara tersebut.

Pada praktiknya, penerapan strategi akumulasi ini, meski merupakan representasi dari kepentingan spesifik dari suatu fraksi dalam kelas kapitalis, tidak bisa diartikan sebagai kondisi di mana penerimaan utuh terjadi dari setiap fraksi dalam kelas kapitalis maupun kelas proletar. Penerimaan terhadap penerapan ini hanya bisa terjadi dengan pengondisian diskursif maupun materiil. Jessop menjelaskan hal ini sebagai **proyek hegemoni** (Jessop, 1983, 1999). Jika strategi akumulasi berkaitan erat dengan ekspansi ekonomi di level nasional maupun internasional, proyek hegemoni utamanya fokus terhadap tujuan-tujuan yang sifatnya non-ekonomi. Lebih lanjut, sebagai konsekuensi langsung dari argumentasi sebelumnya, *strategi akumulasi* berkaitan erat dengan relasi produksi dan perjuangan kelas. Sementara itu, *proyek hegemoni* tidak hanya berkaitan dengan relasi produksi semata, tetapi juga dengan unsur yang lebih luas seperti masyarakat sipil (Jessop, 1983). Dalam artian inilah, proyek hegemonik utamanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya ‘nasional populer’ ketimbang pada relasi kelas semata.

Pada ujungnya, proyek hegemoni ini memberi legitimasi untuk penerapan strategi ini dengan **metode diskursif** maupun **politis**. Bagi kelas kapitalis dan aparatus negara secara umum, proyek hegemoni ini mengakomodir kepentingan mereka secara general. Sementara itu, bagi kelas proletar dan masyarakat secara umum, proyek hegemoni mengakomodir kepentingan secara parsial dan bertujuan untuk mendisorganisasi kelas proletar secara keseluruhan (Jessop, 1983).

Pada konteks yang terakhir disebut, untuk memastikan hal tersebut, proyek hegemoni ini, mengutip Gramsci, mesti diajukan sebagai program nasional-populer (baca untuk kepentingan umum) yang secara eksplisit maupun implisit merupakan representasi dari kepentingan suatu fraksi dalam kelas tertentu (Jessop, 1983, 2018; Koch, 2022). Secara riil, ini misalnya dapat dilihat dalam usaha negara kapitalis untuk mengonstruksi suatu model doktrin nasionalisme dan kebangsaan atau ideologi negara. Konstruksi terhadap dua hal ini kemudian menciptakan suatu kesatuan secara domestik serentak menghomogenisasi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Bahkan, pada konteks terekstrem, kondisi materiil untuk melakukan transnasionalisasi produksi, perang teritorial, dan bahkan genosida dapat dilakukan dengan legitimasi rasa kebangsaan dan nasionalisme (Jessop, 1999).

Berkaitan dengan kesemua hal tersebut, kurang lebih paparan teorisasi Jessop di muka mempunyai tiga argumentasi utama, yaitu 1.) negara adalah medan perebutan ruang antara kelompok sosial dalam suatu negara, 2.) perkembangan suatu negara modern (kapitalistik) bersifat spesifik historis dan merupakan representasi dari kemenangan spesifik

kelompok sosial tertentu, dan 3.) posisi faktor-faktor ideasional (ideologi maupun rumusan nilai nasional tertentu) dikondisikan langsung oleh faktor materiil berikut kelompok sosial tertentu.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka teorisasi ini akan didudukkan sebagai suatu proses domestik dari perkembangan kapitalisme suatu negara. Pada konteks Rusia, proses historis dan perkembangan spesifiknya sebagai negara kapitalis, kelompok sosial yang mendominasi negara tersebut, serta ideologi yang menjadi basis legitimasi mereka akan menjadi poin analisis penting dalam menilai tingkah laku Rusia. Ini utamanya akan dimulai pasca keruntuhan Uni Soviet. Dengan mengajukan ini, analisis ini tetap memberikan signifikansi terhadap faktor domestik dari tindakan Rusia. Di samping itu, posisi faktor ideasional tetap mendapat porsi sekaligus pula didudukkan dalam kaitannya dengan kondisi materiil berikut kelompok kepentingan yang mengajukannya. Dari sini, kompleksitas dari proses domestik dapat terakomodir. Meski begitu, ada pemerincian spesifik yang belum terjelaskan di sini. Hal tersebut adalah signifikansi aktor dalam pengambilan keputusan politik, baik itu secara domestik maupun internasional. Oleh karena itu, konsepsi terkait aktor-aktor spesifik dalam pendekatan dua logika plural yang diajukan pada bagian berikut akan mengisi hal tersebut.

3. Elit Politik, Kelas Kapitalis, dan Kebijakan Luar Negeri

Setelah mendudukkan negara sebagai medan perebutan ruang antara kelompok sosial tertentu secara domestik, maka pemerincian terhadap kelompok sosial apa yang dimaksud

dalam konseptualisasi di muka adalah perlu. Dalam kaitannya dengan itu, merunut pada pendekatan dua logika plural yang dipakai dalam penelitian ini, maka kelompok sosial yang dimaksud di sini adalah elit politik dan kelas kapitalis.² Apa yang menjadi poin penting yang perlu dianalisis dari dua aktor ini adalah relasi, sirkulasi, dan signifikansi mereka dalam pengambilan keputusan politik.

Sebagai permulaan, konseptualisasi terhadap elit politik berikut berbagai variabel yang ikut serta di dalamnya akan diajukan. Pertama-tama, hal mendasar yang perlu diajukan adalah posisi elit politik sebagai suatu kategori sosial mempunyai peran besar dalam proses pengambilan keputusan negara secara domestik maupun luar negeri. Elit politik di sini didefinisikan sebagai sekelompok elit berkuasa yang mempunyai **fungsi politik** dan mampu mempengaruhi **keputusan politik** (Higley and Pakulski, 2012; Tardelli, 2013). Lebih lanjut, dari pendefinisian ini, elite politik secara langsung merujuk pada kategori sosial yang meliputi para pemangku jabatan politik yang cukup tinggi (eksekutif maupun legislatif) atau bahkan ke aktor-aktor terorganisir yang terlibat dalam kompetisi kekuasaan seperti orang-orang penting dalam partai politik. Setiap elit politik, terlepas dari ragam variasi ideologi sampai kekuatannya, mempunyai dan mengejar suatu kepentingan yang sama, yaitu **mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan**

² Sebagai catatan permulaan, mengajukan dua aktor ini sebagai kelompok sosial dalam perebutan ruang kekuasaan di negara tidak sama artinya dengan mengatakan bahwa tidak ada kelompok sosial lain di luar aktor ini. Alasan utama dan mendasar pengajuan dua kelompok sosial ini sebagai kelompok signifikan adalah karena kapasitas, akses, dan kekuatan yang dua aktor ini miliki membuat mereka berada dalam posisi yang lebih diuntungkan dalam proses perebutan ruang kekuasaan di negara. Untuk melengkapi argumentasi ini, definisi terhadap kedua aktor ini perlu diajukan.

kekuatan politiknya (Tardelli, 2013). Dalam kenyataan yang lebih riil, dengan sistem politik yang ada saat ini, hal ini secara langsung bisa merujuk pada konteks domestik maupun internasional.

Secara konseptual maupun praktikal, dalam proses sirkulasi elit politik, kurang lebih ada tiga aktor yang bisa diklasifikasi. **Pertama**, elit politik yang berkuasa dalam pemerintahan, biasa dikenal dengan kubu petahana. **Kedua**, elit politik yang tidak berkuasa penuh dalam pemerintahan tapi tetap mempunyai kekuatan-kekuatan politik seperti sumber daya ekonomi, politik, maupun militer, biasa disebut dengan *counter elite* atau paling lazim disebut dengan oposisi. **Ketiga**, kelompok non-elit yang menjadi suatu kelompok sosial yang secara asertif diandaikan sebagai kelompok yang terdominasi oleh elit, biasa juga dikategorikan sebagai massa.

Keputusan politik domestik maupun luar negeri dianggap sebagai hasil dari relasi ketiga komponen ini. Dengan mengajukan hal tersebut, maka kebijakan luar negeri suatu negara bukan merupakan hasil dari birokrasi tertentu atau sekadar representasi dari kepentingan nasional yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari pertarungan serta dinamika kekuasaan antara elit politik dan *counter elite*. Sementara itu, kelompok non-elit hanya penting keberadaannya sebagai pihak yang mesti dihegemoni (Tardelli, 2013). Pada praktiknya, proses relasi ketiga komponen tersebut juga dipengaruhi oleh struktur pemerintahan dan aturan terkait sirkulasi pemerintahan dalam suatu negara (Aron, 1950;

Dahl, 1996). Dinamika semacam inilah yang terjadi pada tataran elit politik dan ini sekaligus menunjukkan sifat konflikual dari proses politik domestik suatu negara.

Di samping semua hal tersebut, keberadaan serta kekuasaan elit politik dalam banyak hal mensyaratkan satu hal penting, yaitu keberadaan serta perkembangan negara itu sendiri. Sejak negara modern yang ada saat ini sudah secara inheren mempunyai ciri distingtif kapitalistis, maka keberadaan kelas kapitalis serta pertumbuhannya menjadi krusial bagi sirkulasi maupun kekuasaan elit politik secara inheren (Davidson, 2010, 2012). Di sisi lain, kepentingan utama kelas kapitalis, akumulasi kapital pada tataran domestik maupun internasional, membutuhkan intervensi langsung dari elit politik. Relasi mutual-suportif di antara kedua aktor ini yang penting untuk dijadikan permulaan analisis dalam melihat kecenderungan tindakan suatu negara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, sejak kelas kapitalis sebagai suatu kelas bersifat beragam, klasifikasi terhadap kelas kapitalis sebagai berikut fraksi-fraksi yang ada di dalamnya perlu diajukan. Pada konteks ini, penelitian ini utamanya menggunakan klasifikasi yang diajukan oleh Bryan dan Glassman (*via* Al-Fadhat, 2019). Klasifikasi ini didasarkan pada skala akumulasi kapital masing-masing fraksi dalam pasar global. Fraksi pertama adalah **fraksi kapitalis internasional** (*international capitalist*). Fraksi ini adalah grup yang mempunyai kapasitas investasi, produksi, dan komoditas yang berskala internasional. Fraksi ini mampu untuk berinvestasi dan menjual produknya di pasar domestik maupun internasional. Fraksi kedua adalah **fraksi kelas kapitalis dengan**

investasi terbatas (*investment-constrained capitalist*). Fraksi kelas ini mempunyai skala yang lebih sedikit ketimbang kelompok kapitalis sebelumnya. Mereka hanya mampu berinvestasi secara domestik dan menjual barangnya secara domestik sekaligus mengekspornya. Fraksi ketiga adalah **fraksi kelas kapitalis dengan pasar terbatas** (*market-constrained capitalist*). Kelompok ini mampu menginvestasikan kapital mereka secara domestik maupun internasional, tapi mereka hanya mampu memasarkan produk kelompok kapitalis lain. Fraksi keempat adalah **fraksi kelas kapitalis nasional** (*national capitalist*). Kelompok ini hanya mampu berinvestasi dan menjual produknya di ranah domestik.

Masing-masing kelas kapitalis yang telah diajukan di muka mempunyai kepentingan spesifik dan ingin mendorong kebijakan politik spesifik yang mendukung kepentingan mereka. Dalam prosesnya, kelas kapitalis membangun aliansi dengan elit politik tertentu untuk mencapai hal tersebut. Representasi dari hal ini bisa muncul dalam berbagai macam bentuk seperti kuatnya asosiasi bisnis tertentu dalam pengambilan kebijakan politis tertentu, akses dengan elit politik pada birokrasi tertentu, atau bahkan menjadi elit politik itu sendiri (Al-Fadhat, 2019).

Dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri, kelas kapitalis yang paling berkepentingan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri adalah kelas kapitalis yang paling terinternasionalisasi (Al-Fadhat, 2019). Pada konteks yang lebih spesifik, elit politik yang menduduki peran penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri seperti presiden,

menteri luar negeri, menteri perdagangan, dan lain-lain adalah elit politik yang secara mendasar terhubung dengan fraksi kapitalis internasional (Cox, 2017).

Dengan mengajukan keseluruhan argumentasi di muka, relasi antara elit politik dan kelas kapitalis secara strategis terhubung dan dalam kondisi tertentu dipengaruhi secara signifikan oleh kelas kapitalis. Kepentingan elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya sama sekali tidak bisa mengabaikan relasinya dengan kepentingan kelas kapitalis (Al-Fadhat, 2019) Meski demikian, kepentingan di antara keduanya, alih-alih secara inheren koheren, mensyaratkan pertemuan pada momen historis spesifik tertentu. Untuk itu, analisis historis spesifik menjadi perlu untuk diajukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks Rusia, dinamika relasi elit politik dan kelas kapitalis yang telah diajukan di muka menjadi titik berangkat analisis terhadap perkembangan Rusia sebagai negara. Konseptualisasi aktor spesifik ini akan melengkapi konseptualisasi negara Bob Jessop yang telah diajukan sebelumnya. Dengan mengatakan hal tersebut, kemenangan dari kelompok sosial tertentu (aliansi elit politik dan kelas kapitalis tertentu) secara domestik di Rusia mempunyai signifikansi penting dalam tindakan Rusia ke Ukraina. Secara asumptif, seturut dengan konseptualisasi aktor spesifik bagian ini, penelitian ini merujuk pada aliansi elit politik dengan kelas kapitalis internasional dalam Rusia sebagai aktor dengan kepentingan paling utama ke Ukraina.

4. Simpulan

Pendekatan dua logika plural dalam kebijakan luar negeri yang diajukan dalam penelitian ini memberi titik berangkat analisis yang cukup spesifik. Secara struktural internasional, pendekatan ini mengasumsikan faktor penting yang berkontribusi terhadap tindakan Rusia adalah ekspansi kapital negara-negara Barat dan manuver imperialis Amerika ke Ukraina secara spesifik. Sementara itu, secara domestik, perkembangan spesifik kapitalisme Rusia berikut aliansi spesifik antara elit politik dan kelas kapitalis internasional Rusia menjadi pendorong signifikan terhadap manuver Rusia di Ukraina. Dengan mengajukan ini, penelitian ini secara asumptif mendudukkan kasus Rusia-Ukraina sejak 2014-2022 sebagai konflik geopolitik yang dikondisikan oleh ekspansi dan perkembangan kapitalisme dari negara-negara kapitalis yang terlibat. Di samping itu, sebagai konsekuensi logis atas pengajuan pendekatan ini, maka analisis dalam penelitian ini akan berfokus untuk mendeskripsikan berikut melakukan suatu analisis kausal terhadap beberapa faktor berikut.

- 1) Proses ekspansi kapital berikut manifestasi kebijakan negara-negara Barat ke wilayah Eropa Timur secara general dan Ukraina secara spesifik. Sementara itu, manuver imperial Amerika ke Eropa Timur dan Ukraina akan dipaparkan pula.
- 2) Perkembangan Rusia sebagai negara kapitalis pasca runtuhnya Uni Soviet akan dipaparkan sebagai suatu proses historis yang mengondisikan perkembangan Rusia sebagai negara saat ini. Merujuk pada konseptualisasi yang telah diajukan di dalam

penelitian ini, maka model pertumbuhan ekonomi spesifik dari Rusia berikut ideologi dominan yang menjustifikasinya akan berusaha dilacak dan dipaparkan dalam penelitian ini.

- 3) Proses konflik domestik antara aliansi kelompok sosial (elit politik dan kelas kapitalis) tertentu dalam Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Analisis historis terhadap proses ini dan kelompok sosial tertentu yang memenangkan proses ini akan menjadi poin utama dalam proses analisis ini. Sebab, hal tersebut secara signifikan mengondisikan tindakan Rusia ke Ukraina dari tahun 2014-2022.

B. Penelitian Terkait yang Membahas Kebijakan Luar Negeri Rusia ke Ukraina dari tahun 2014-2022

Setelah mengajukan perincian terhadap keseluruhan konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini adalah perlu untuk mendudukan skema teoretis yang digunakan penelitian ini dalam perdebatan skema teoretis yang telah berusaha menjelaskan kebijakan luar negeri Rusia-Ukraina sejak 2014-2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang telah disinggung secara ringkas di latar belakang penelitian ini (bab 1), kasus Rusia-Ukraina sejak 2014 telah berusaha ditelaah beberapa pendekatan dominan dalam studi HI. Masing-masing pendekatan tersebut mengajukan penjelasan terkait *mengapa*, *bagaimana*, dan *kepentingan apa* yang melatarbelakangi tindakan-tindakan Rusia terhadap Ukraina. Beberapa pendekatan yang dimaksud adalah realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme.

Adapun untuk menunjukkan *state of the art* dari penelitian ini, maka paparan dari masing-masing pendekatan teoretis yang telah ada mesti dipaparkan dengan tiga poin kunci, yaitu *substansi dasar* masing-masing teori dalam FPA, *jawaban masing-masing teori* dalam kasus Rusia-Ukraina, dan *keterbatasan* masing-masing pendekatan secara substantif teoretis maupun penerapannya dalam studi kasus di Rusia. Setelahnya, akan ditunjukkan bagaimana penelitian ini, dengan pendekatan Marxis dua logika plural yang digunakan sebagai skema teoretis, mampu menyediakan skema teoretis yang cukup berbeda untuk menganalisis kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina dari tahun 2014-2022.

1. Realisme

Pendekatan realisme menempatkan *power* sebagai pusat dari perilaku semua bangsa-bangsa (Bakry, 2019). Penempatan *power* sebagai hal utama tidak lepas dari beberapa asumsi yang mendasari pendekatan ini. Dunia yang anarki dan dipenuhi konflik serta pandangan pesimis bahwa negara secara inheren egois adalah beberapa di antaranya (Sorensen and Jackson, 2009). Pada prosesnya, dalam setiap teorisasi realisme (realisme klasik, neorealisme, atau bahkan realisme neoklasik) berikut berbagai perkembangannya, unsur-unsur yang telah disebutkan di muka selalu nampak dan inheren dalam pendekatan realisme.

Dalam kaitannya dengan studi-studi FPA, pendekatan realisme memberi corak analisis yang bersifat *top-down* dalam mengkaji tingkah laku suatu negara (Hara, 2011). *Top-down* di sini pertama-tama mesti diartikan sebagai penekanan kuat realisme terhadap

struktur internasional yang anarki dan ketimpangan persebaran *power* (kapabilitas materiil) setiap negara sebagai penentu utama dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Dalam pendekatan neorealisme yang diusung Kenneth Waltz maupun Mearsheimer misalnya, tindakan negara dalam merespon kondisi internasional yang anarki dan serba tak tentu ini akan mengarah pada tindakan *balancing* yang defensif (Waltz) maupun ofensif (Mearsheimer) dari suatu negara/*balance of power* (Hara, 2011; Wivel, 2017). Pada prosesnya, kritik intensif diarahkan pada pendekatan neorealisme ini sebab pendekatan ini mengabaikan kondisi domestik yang berkontribusi juga terhadap tindakan negara dalam dunia internasional (Kaarbo, 2015). Sebagai respon atas hal tersebut, realisme neoklasik hadir dan mulai memasukkan unsur-unsur domestik dalam kalkulasi pengambilan kebijakan suatu negara. Dalam kaitannya dengan ini, realisme neoklasik tetap mendudukan kondisi internasional yang anarki sebagai variabel independen dan kondisi domestik seperti persepsi pemimpin, relasi negara-masyarakat, institusi serta sistem pemerintahan, dan ideologi suatu negara sebagai faktor yang memproses kondisi internasional dan menghasilkan kebijakan suatu negara (Rose, 1998; Taliaferro, Lobell and Ripsman, 2015).

Pada kasus Rusia-Ukraina, pendekatan realisme kembali mendapat angin segar setelah sebelumnya mengalami insignifikansi karena berakhirnya perang dingin yang berada di luar prediksi pendekatan realisme (Darar, 2022). Ada pula yang berkomentar bahwa dengan munculnya fenomen intervensi militer Rusia realisme telah kembali berhasil

menunjukkan relevansi pendekatannya (Walt, 2022). Bahkan, dalam konteks domestik Rusia sendiri, pasca Uni-Soviet, teori HI yang dominan diproduksi sebagai wacana akademik maupun politis adalah realisme (Kropatcheva, 2019). Oleh karenanya, dalam banyak konteks, tidaklah mengherankan untuk melihat bahwa kasus Rusia-Ukraina sangat didominasi oleh pendekatan realisme.

Dalam kaitannya dengan beberapa penjelasan yang telah diajukan di muka, penjelasan pendekatan realisme dalam kasus Rusia-Ukraina ini nampak dalam artikel John Mearsheimer yang mengemukakan sebab utama dari tindakan Rusia adalah ekspansi yang dilakukan oleh NATO dan mispersepsi negara-negara Barat dalam melakukan ekspansi demokrasi ke wilayah Eropa Timur (Mearsheimer, 2014). Rusia, seturut logika sistemik anarki realisme, hanya melakukan respon *balancing* semata terhadap ekspansi tersebut (J. J. Mearsheimer, 2014; Oktaviano, 2015; Zverev, 2015; Alim, 2019; Amirkhanov, 2021). Hal ini juga diperkuat oleh bagaimana sejak masa presiden Boris Yeltsin sampai dengan Putin, sentimen Rusia terhadap ekspansi NATO dan negara Barat telah bertransformasi dari sekadar sentimen laten sampai menjadi tindakan yang begitu asertif bahkan agresif (Jensen, 2018).

Namun, pendekatan yang identik dengan neorealisme di muka mengalami kritik signifikan. Ini utamanya menyorot pada pengabaian proses domestik Rusia dalam proses pengambilan keputusan; sesuatu yang wajar mengingat ini adalah konsekuensi logis dari pendekatan neorealisme jika digunakan dalam studi FPA. Dalam kaitannya dengan itu,

pendekatan realisme neoklasik berusaha menawarkan jawaban atas kritik tersebut. Berangkat dengan asumsi kondisi internasional yang sama (ekspansi NATO dan juga negara Barat), pendekatan realisme neoklasik juga memasukkan sistem pemerintahan, persepsi personal Putin, relasi negara-masyarakat Rusia, dan ideologi patriotisme yang digunakan untuk memobilisasi dukungan massa sebagai faktor penyokong yang memproses ekspansi NATO dan negara Barat sampai menghasilkan tindakan intervensi militer Rusia terhadap Ukraina (Romanova, 2012; Reichwein, 2016; Unterlohner, 2017). Dengan mengajukan faktor-faktor tambahan tersebut, realisme neoklasik nampak telah melampaui kekurangan pendekatan neorealisme dalam menganalisis tindakan Rusia.

Meskipun demikian, ada beberapa problem mendasar yang tetap nampak dalam pendekatan realisme berikut variannya dalam menjelaskan kasus Rusia. Hal ini secara mendasar merupakan keterbatasan inheren teorisasi realisme terkait signifikansi tunggal struktur internasional berikut sifat anarkinya terhadap kebijakan suatu negara dan separasi tegas antara politik internasional dan politik domestik (Rosenberg, 1992; Kaarbo, 2015). Sebagai konsekuensi logis terhadap hal tersebut, ada dua keterbatasan utama dari pendekatan realisme yang mengemuka dalam kaitannya dengan kasus Rusia-Ukraina.

Pertama, argumentasi Mearsheimer terhadap penyebab empirik dari tindakan Rusia secara mendasar berkontradiksi terhadap premis utama realisme yang ia ajukan. Setelah mendaku ekspansi NATO dan promosi demokrasi negara-negara Barat sebagai kondisi struktural utama terhadap tingkah laku Rusia, Mearsheimer seakan mengabaikan premis

realisme ofensif yang ia ajukan (Kuzio and D'Anieri, 2018). Bukankah negara-negara Barat dan Eropa melakukan ekspansi ke Eropa Timur adalah juga tingkah laku yang diklaim realisme sebagai tingkah laku negara besar untuk membuatnya merasa aman dan usahanya untuk bertahan di situasi internasional yang anarki? Untuk itu, meski diselimuti sebagai dalil-dalil liberalisme dan demokrasi, tindakan-tindakan NATO maupun negara-negara Barat adalah tindakan yang justru diakomodir pula dalam teorisasi realisme. Hal ini secara langsung membuat deskripsi Mearsheimer terhadap promosi demokrasi negara Barat berikut ekspansi NATO mengalami kontradiksi internal dari asumsi-asumsi teoretis yang dia anut.

Sementara itu, pada konteks **kedua**, baik neorealisme maupun realisme neoklasik sama-sama menempatkan proses domestik pada posisi yang insignifikan dalam penentuan tindakan Rusia. Jika neorealisme mengabaikan sama sekali proses domestik, realisme neoklasik sekadar mengajukan proses domestik yang menunjukkan kapan, mengapa, dan dalam kondisi apa suatu negara melakukan *balancing* terhadap kondisi internasional. Hal ini misalnya tidak mampu menangkap fakta bahwa bahkan sejak sebelum NATO dan Eropa melakukan ekspansi ke wilayah Ukraina, Rusia telah berkonflik lebih dulu dengan Ukraina (Onati, 2016). Fakta ini secara langsung menunjukkan ketiadaan dorongan struktur internasional dalam kebijakan suatu negara dan signifikansi dorongan domestik Rusia dalam relasinya dengan Ukraina. Jikapun ada penjelasan terkait dorongan domestik, maka jawaban pendekatan realis akan cenderung sirkular. Hal ini dapat dilihat dalam argumentasi

realisme ofensif Mearsheimer yang mengajukan bahwa negara besar berikut segala kapabilitas materiilnya cenderung mempunyai dorongan untuk melakukan ekspansi dengan alasan dilema keamanan dan dorongan untuk membuatnya dirinya aman/*state's survival* (Schweller, 2009; J. Mearsheimer, 2014). Akan tetapi, mengapa dan kondisi apa yang mendorong negara besar untuk selalu berada dalam situasi dilema keamanan tidak pernah secara sistemik diajukan dan justru tidak banyak terjelaskan (Gowan, 2002a). Oleh karenanya, pendekatan realisme dengan segala variannya tidak cukup mampu menjelaskan kompleksitas fenomen yang mengondisikan tindakan Rusia terhadap Ukraina.

2. Liberalisme

Pendekatan liberal dalam HI merupakan salah satu pendekatan yang paling sengit menentang realisme dan berbagai macam proponennya. Ini tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar pendekatan liberal yang secara inheren berlawanan dengan realisme. Meski sama-sama mengakui bahwa natur dunia internasional adalah anarki, para pemikir liberal tidak menganggap bahwa ujung dari natur dunia secara inheren adalah konflikual (Bakry, 2019).

Untuk menjelaskan argumentasi yang telah diajukan di muka, beberapa pemikir liberal mengembangkan beberapa varian jawaban yang kemudian menjadi varian aliran dalam pemikiran liberal. Klasifikasi Doyle yang mengikuti klasifikasi Waltz terkait level analisis (individu, domestik, dan dunia internasional) berguna untuk diajukan di sini (Michael W. Doyle, 2019). Pada level individu, ada John Locke yang mengajukan natur manusia sebagai individu yang rasional dan mungkinnya kerja sama antar sesama manusia (Sorensen and Jackson, 2009). Pada level domestik, sistem pemerintahan yang demokratis

serentak liberal dalam suatu negara akan memudahkan kerja sama dan menciptakan perdamaian. Ini secara langsung dipromosikan oleh aliran pemikiran *liberal republikan* yang utamanya terinspirasi dari Immanuel Kant dan melahirkan tesis *democratic peace theory* (Sorensen and Jackson, 2009; Michael W. Doyle, 2019). Pada level internasional, aliran liberal interdependensi dan institusional mengajukan bahwa sistem ekonomi liberal dan institusi internasional akan mengurangi potensi konflikual dari anarki. Sistem ekonomi liberal akan memperkuat interdependensi antar negara secara ekonomi dan institusi internasional akan mempromosikan nilai-nilai yang kooperatif dan penghargaan terhadap hak atas individu (Sorensen and Jackson, 2009). Kesemua klasifikasi ini secara mendasar mengemukakan beberapa esensi dari pendekatan liberal dalam ilmu HI.

Konsekuensi logis dari substansi pendekatan liberal ini dapat pula terlihat dalam relasinya dengan corak FPA yang dipelopori oleh pendekatan liberal. Dalam konteks ini, pendekatan liberal dalam FPA mempunyai corak *inside-out* dalam menjelaskan tingkah laku suatu negara (Hara, 2011). Dengan kata lain, faktor domestik memainkan peranan penting dalam menjelaskan perilaku negara. Pada titik ini, corak suatu sistem pemerintahan dan nilai-nilai domestik diposisikan sebagai faktor paling signifikan. Di pendekatan liberal sendiri, umumnya sistem pemerintahan hanya dibagi atas sistem demokrasi dan non-demokrasi (Kaarbo, 2015). Dua jenis sistem ini mempengaruhi tindakan suatu negara secara general. Negara dengan sistem demokrasi dan nilai-nilai liberal menghasilkan kebijakan yang lebih kooperatif dan pasif, sedangkan non-demokrasi cenderung untuk

ekspansionis dan konflikual (Hara, 2011). Sebagai konsekuensi logis dari konseptualisasi semacam ini, pendekatan liberal secara inheren menganjurkan persebaran demokrasi oleh negara-negara liberal maupun institusi-institusi internasional yang mempunyai nilai-nilai liberal (Hellmann, 2010). Pada ujungnya, ada imajinasi *perpetual peace* Kantian dan penciptaan tatanan dunia liberal yang berusaha diwujudkan dari konseptualisasi maupun praktik dari pendekatan liberal.

Corak pendekatan liberal dalam FPA yang telah diajukan di muka juga mewarnai bagaimana pendekatan liberal berusaha memberikan penjelasan terhadap tindakan Rusia terhadap Ukraina sejak 2014. Beberapa pemikir liberal yang turut memberi penjelasan terhadap hal ini adalah John Ikenberry, Michael McFaul, Francis Fukuyama, dan Stephen Sestanovich. Beberapa pemikiran ini mengajukan suatu argumentasi yang menentang mentah-mentah argumentasi Mearsheimer soal kontribusi negara-negara Barat dan Amerika terhadap tindakan Rusia dan mengajukan faktor domestik sistem pemerintahan autokratik dan Putin sebagai individu sebagai faktor determinan dalam kasus Rusia-Ukraina. Beberapa pemikir liberal melihat manuver negara-negara Barat dan Amerika (NATO) ke wilayah Eropa Timur adalah penciptaan tatanan dunia liberal dan merupakan tindakan serta pilihan otonom dan rasional dari negara-negara Eropa Timur (Mcfaul, 2014; Sestanovich, 2014; Alim, 2019; Fukuyama, 2022). Karenanya, tindakan Rusia yang agresif merupakan konsekuensi dari tatanan sistemik Rusia yang autokratik dan persepsi iliberal personal Putin (Mcfaul, 2014, 2020; Amirkhanov, 2021). Bahkan, manuver Putin dipandang sebagai usaha

untuk menghidupkan kembali Uni Soviet and juga penghancuran tatanan dunia yang liberal (Alim, 2019; Fukuyama, 2022). Argumentasi-argumentasi di muka kemudian diperkuat oleh penjelasan di mana tindakan agresif Rusia baru dimulai di masa kepresidenan Putin (dua presiden sebelumnya, Boris Yeltsin dan Dimitry Medvedev tidak melakukan manuver ini) dan merupakan usaha personal Putin untuk menghalau persebaran demokrasi di Eropa Timur dan Rusia secara domestik (Mcfaul, 2020). Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan pendekatan liberal di muka, telah dapat terlihat corak pendekatan liberal yang koheren secara substantif dalam penjelasan tindakan Rusia terhadap Ukraina sejak 2014.

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang telah diajukan oleh pendekatan liberal ini, beberapa keterbatasan fundamental dari pendekatan liberal dalam menjelaskan kasus Rusia, baik itu secara empirik maupun konseptual, dapat diajukan. **Pertama**, klaim berlebihan pendekatan liberal secara konseptual terhadap sistem demokrasi (*democratic peace theory*) dan nilai-nilai liberal cenderung mengabaikan fakta-fakta mendasar yang terjadi. Meski mengajukan data statistik untuk menyokong argumentasi liberalnya dan adanya mekanisme kontrol masyarakat terhadap keputusan negara dalam sistem demokrasi, pendekatan ini mengabaikan fakta bahwa bahkan negara demokrasi pun kerap melakukan intervensi militer dan agresif terhadap negara lain. Beberapa pemikir liberal mungkin akan mengajukan argumentasi bahwa manuver itu hanya ditujukan ke negara non-demokratis. Namun itu tidak mengabaikan fakta bahwa dalam sistem demokrasi sekalipun, negara dengan sistem demokrasi tetap mungkin melakukan tindakan ekspansif secara militer

(Kaarbo, 2015). Di samping itu, klaim nilai-nilai liberal terhadap interdependensi antar negara dan kerja sama ekonomi di antara sesama negara liberal mempunyai keterbatasan untuk menjelaskan pola kebijakan ekonomi merkantil di antara sesama negara Eropa dan Amerika di bidang industri serta menjelaskan hubungan penuh ketegangan antara Jepang dan Tiongkok di Asia Timur (Gowan, 2010; Al-Fadhat, 2019). **Kedua**, dalam kaitannya dengan kasus Rusia-Ukraina, secara empirik, meski mengajukan signifikansi faktor domestik dalam penjelasannya, klaim-klaim pemikir liberal terhadap apa yang mendorong tindakan Rusia cenderung reduktif dan mengeliminir fakta-fakta yang ada. Pada konteks ekspansi NATO dan negara-negara Barat misalnya, alih-alih sekadar mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan klaim tindakan rasional negara-negara Eropa Timur dalam merangkul hal tersebut, manuver politik dan keamanan juga dilakukan oleh negara-negara Barat dan Amerika dalam membiayai intelijeni dan diseminasi ide-ide demokrasi telah direncanakan jauh-jauh hari (Bulent Gokay, 2015). Meminjam argumen Bulent Gokay, konflik Rusia-Ukraina, alih-alih merupakan konflik demokrasi versus autokrasi, adalah konflik geopolitik antara negara-negara Barat, Amerika, dan juga Rusia (Bulent Gokay, 2015). Di samping itu, klaim McFaul soal signifikansi dominan Putin berikut pemikiran iliberalnya juga tidak cukup kuat. Ketidaknyamanan Rusia terhadap ekspansi NATO dan negara-negara Barat dan manuver kebijakannya yang agresif tidak hanya terjadi di masa Putin, tetapi secara kontinyu dikemukakan oleh Boris Yeltsin dan manuver yang agresif juga terjadi di masa Dmitry Medvedev (Jensen, 2018). Beririsan dengan itu, klaim terhadap signifikansi Putin

sebagai individu juga mengabaikan asal-usul pemikiran Putin dan mengapa ide-ide Putin itu mampu diterima secara luas oleh elit-elit politik Rusia maupun masyarakat Rusia secara luas. Sesuatu yang wajar mengingat klaim pendekatan liberal terhadap individu cenderung berupa kultus dan mengabaikan proses historis pembentukan seorang individu. Oleh karena itu, dari kesemua paparan ini, alih-alih menawarkan penjelasan yang kompleks terhadap kasus Rusia-Ukraina, pendekatan liberal lebih merupakan justifikasi ideologis ekspansi Amerika maupun negara-negara Barat dan mengajukan penjelasan yang kabur terhadap pertanyaan mengapa, bagaimana, dan apa tujuan akhir dari tindakan Rusia di Ukraina.

3. Konstruktivisme

Kemunculan pendekatan konstruktivisme dalam HI secara substansial berkaitan erat dengan kritik atas pendekatan realisme dan liberalisme berikut corak positivisnya (Sorensen and Jackson, 2009; Bakry, 2019). Kritik yang diajukan oleh konstruktivisme utamanya mengarah pada aras ontologis yang diajukan oleh pendekatan yang ia kritik. Dalam artian tersebut, konstruktivis mengkritik realitas materiil semata yang diajukan oleh realisme dan liberalisme lalu mengajukan realitas yang ideasional. Oleh karenanya, aliran konstruktivisme pada tempat paling pertama menempatkan peranan signifikan hal-hal ideasional sebagai faktor pendorong utama pembentukan realitas politik global maupun hubungan internasional.

Dalam mengelaborasi argumentasi tersebut, konstruktivisme memberi tiga asumsi penting, yaitu realitas adalah kumpulan ide, pentingnya peranan identitas, dan relasi

aktor-struktur yang saling mempengaruhi (Flockhart, 2019). **Asumsi pertama** mengarah pada penjelasan bahwa konstruksi realitas internasional adalah konstruksi dari pemahaman intersubjektif, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, alih-alih bertindak sebagai aktor rasional (*homo oikonomicus*), aktor pada dasarnya bersifat sosial (*homo sociologicus*) (Boekle, Rittberger and Wagner, 1999). Artinya, ia bertindak berdasarkan nilai yang dia anut dan norma yang ada dalam masyarakat (*logic of appropriateness*). **Asumsi kedua**, identitas memainkan peranan penting dalam tingkah laku negara berikut kepentingan nasional yang dia anut. Proses pembentukan identitas ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana suatu aktor mempersepsikan dirinya dan yang Lain (Flockhart, 2019).³ **Asumsi ketiga**, karena realitas pada dasarnya adalah ide, maka relasi antara struktur (realitas) dan aktor adalah konstitutif sifatnya. Terinspirasi dari teorisasi strukturasi Giddens, konstruktivisme mengajukan bahwa aktor mampu mengubah struktur melalui praktik-praktik repetitif yang mengubah pemahaman intersubjektif, norma, atau nilai (Flockhart, 2019). Dalam kaitannya dengan keilmuan HI, pernyataan bahwa *anarchy is what states make of it* dari Alexander Wendt adalah representasi dari argumentasi yang telah diajukan di muka.

Pada perkembangannya, sejak 1990-an, setelah mendapat angin segar dari kegagalan pendekatan realisme maupun liberal dalam menjelaskan berakhirnya perang

³ Contoh yang paling sering diberikan ada di persoalan *security dilemma*. Aliran konstruktivis menunjukkan ketidakmampuan pendekatan realis untuk menunjukkan mengapa ketika negara-negara Eropa menambah nuklirnya, Amerika justru tidak merasa terancam. Menurut konstruktivisme, ini disebabkan oleh persepsi Amerika yang menganggap negara-negara Eropa sebagai negara yang bukan musuhnya.

dingin, pendekatan ini berkembang dengan klasifikasi tiga aliran, konstruktivisme sistemik, domestik, dan juga holistik (Behraves, 2011). Aliran sistemik dipelopori oleh Alexander Wendt dan mempunyai aksentuasi kuat terhadap realitas ideasional dari dunia internasional dan negara sebagai aktor utama. Karenanya pula, aliran ini mengasumsikan negara sebagai satu aktor utuh dan mengabaikan proses domestik (Behraves, 2011). Sebagai respon atas hal tersebut, pendekatan domestik mulai memelopori pentingnya proses pembentukan kepentingan nasional secara domestik berikut nilai-nilai dan norma domestik (Wicaksana, 2009; Behraves, 2011). Pada perkembangan yang terakhir, aliran konstruktivis holistik, yang dipelopori oleh John Ruggie dan Friedrich Kratochwill, mengemukakan pentingnya proses internasional maupun domestik dalam membentuk identitas nasional dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara.

Dengan perkembangan dan penjelasan-penjelasan yang telah diajukan di muka, pendekatan konstruktivisme dalam studi FPA juga memberi corak yang spesifik dan menjanjikan (Houghton, 2007; Hara, 2011). Ketiadaan logika sistemik (sebab-akibat) dan posisi yang signifikan terhadap aktor berikut proses domestik yang ada di dalam aliran ini adalah beberapa alasannya. Selain itu, peran ide secara domestik maupun internasional, proses domestik pembentukan identitas nasional dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan, serta pentingnya analisis historis maupun kultural terhadap perkembangan ide, nilai, maupun norma menjadi kekuatan pendekatan konstruktivis dalam studi FPA (Houghton, 2007; Wicaksana, 2009; Hara, 2011). Alih-alih menjelaskan tindakan suatu

negara sebagai sesuatu yang terberi, konstruktivis akan pertama-pertama meragukan itu dan mempertanyakan mengapa dan proses apa yang membuat suatu negara bertindak secara tertentu (*how possible*).

Dalam kaitannya dengan kasus Rusia-Ukraina, pendekatan konstruktivis mengajukan beberapa jawaban terhadap mengapa dan bagaimana Russia bertindak terhadap Ukraina sejak 2014. Adapun secara dominan, pendekatan konstruktivisme mengajukan pentingnya peranan identitas nasional, persepsi kawan dan lawan, serta norma-norma tertentu dalam membentuk tingkah laku Rusia terhadap Ukraina (Tahir, 2015). Pada konteks pengaruh norma-norma tertentu, ini utamanya mengarah pada bagaimana norma-norma intervensi kemanusiaan mewarnai diskursus yang digunakan oleh Rusia untuk melegitimasi tindakannya ke Ukraina (Ketenci and Nas, 2021). Sementara itu, diskusi soal peran identitas nasional dari Rusia mendapat porsi paling dominan dalam literatur Rusia dan pendekatan konstruktivis. Dalam banyak konteks, tindakan Rusia ke Ukraina dari perspektif konstruktivis dianggap sebagai pengukuhan identitas ke-Rusia-an dan usaha membangun identitas *Russian World* di wilayah Eropa Timur (Zverev, 2015; Onati, 2016; Sudiby, 2018; Widiassa, 2018). Secara domestik, pembentukan identitas dan proyeksinya ke wilayah Eropa Timur ditelaah sebagai proses konflikual antara berbagai macam kelompok kepentingan di Rusia (Charles E. Ziegler, 2007; Feklyunina, 2016). Dengan ini, analisis konstruktivis juga mampu memotret proses domestik dan signifikansinya terhadap kebijakan Rusia ke Ukraina.

Sementara itu, ada juga analisis konstruktivis yang mengajukan bahwa mentalitas serta persepsi Rusia di masa perang Dingin masih bertahan dan berperan signifikan dalam cara pandang Rusia terhadap manuver negara-negara Barat dan NATO ke Eropa Timur (Esmati, 2015; Tahir, 2015). Di sisi lain, ada juga yang mengajukan analisis bahwa dalam persepsi Rusia, Ukraina secara historis, kultural, maupun sosial telah menjadi bagian dari identitas Rusia. Untuk itu, identitas nasional Rusia juga menjangkau jauh sampai ke wilayah Ukraina (Amirkhanov, 2021). Bersamaan dengan itu, proses pembentukan identitas nasional domestik Ukraina yang juga tidak sempurna turut berkontribusi terhadap mungkinannya perpecahan dari internal Ukraina itu sendiri (Kamalyan, 2016). Di samping itu, penetrasi negara-negara Barat ke Ukraina dipandang pula sebagai proses penyebaran identitas ke-Barat-an yang mampu mengganggu narasi identitas ke-Rusia-an (Feklyunina, 2016). Dalam konteks ini, pendekatan konstruktivis mendudukan konflik Rusia-Ukraina adalah konflik dan pertarungan identitas. Dengan demikian, secara keseluruhan, dapat terlihat kecenderungan pendekatan konstruktivis dalam menekankan signifikansi dan primasi aspek ideasional dalam tingkah laku Rusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah mengajukan analisis yang cukup komprehensif serta alternatif dari perspektif dominan, keterbatasan fundamental dari pendekatan konstruktivisme masih bisa diajukan. Ini utamanya mengarah pada independensi dan primasi terhadap peran identitas nasional ke-Rusia-an terhadap tindakan Rusia. Meski telah mampu memotret proses konfliktual pembentukan identitas nasional

Rusia secara domestik berikut signifikansinya terhadap tindakan Rusia ke Ukraina maupun Eropa Timur, menganggap bahwa proses pembentukan identitas nasional ini lepas sama sekali dari faktor materiil adalah hal yang reduktif. Ide sudah selalu dikondisikan oleh kondisi materiil dan karenanya ide tertentu adalah representasi tertentu dari kondisi materiil tertentu. Dalam kaitannya dengan konteks Rusia, sulit membayangkan identitas ke-Rusia-an yang membawa anasir-anasir negara adidaya dapat tumbuh tanpa perkembangan Rusia di bidang ekonomi dan politik. Tanpa perkembangan di bidang materiil yang telah disebutkan pula, imajinasi terhadap konflik militer maupun sifat Rusia sejak awal abad ke-21 yang asertif sulit dibayangkan. Karenanya, suatu proyek ideasional tertentu sudah selalu diiringi oleh kemampuan materiil yang sepadan. Sementara itu, pendekatan konstruktivis tidak memungkinkan aliran ini untuk mewedahi analisis terhadap argumentasi yang diajukan di muka. Sebab itu, pendekatan lain perlu diajukan untuk melampaui keterbatasan tersebut.

4. Simpulan

Dari berbagai paparan teorisasi yang telah diajukan di muka, maka dapat terlihat beberapa ciri spesifik dari masing-masing pendekatan yang telah berusaha untuk mengkaji isu Rusia-Ukraina. Adapun beberapa ciri mendasar dari masing-masing pendekatan secara general nampak dari bagaimana cara masing-masing pendekatan mendeskripsikan beberapa level analisis yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina dari tahun 2014-2022.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan keseluruhan bangunan literatur yang telah diajukan sebelumnya, pendekatan dua logika plural mempunyai ciri spesifik yang membedakannya dengan pendekatan-pendekatan HI yang lain. Hal ini mengarah pada deskripsinya terkait tentang dunia internasional sebagai imperialisme Amerika (dan konsekuensinya terhadap ekspansi kapitalisme Uni Eropa ke Ukraina), perkembangan kapitalisme Rusia yang spesifik, dan peran aliansi elit politik dan kelas kapitalis Rusia dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia ke Ukraina sejak 2014-2022. Hal ini secara lebih gamblang akan divisualisasikan dalam bentuk tabel 2.1.

Pendekatan HI	Internasional	Domestik	Aktor
Realisme	Ekspansi Geopolitik NATO dan Persebaran Demokrasi Uni Eropa	Rusia melakukan logika <i>balancing</i>	Elit Politik Rusia didorong oleh penyeimbangan kekuatan
Liberalisme	NATO/Uni Eropa sebagai pelindung HAM dan Demokrasi	Rusia adalah rezim otoriter yang anti demokrasi dan bersifat ekspansionis	Elit Politik Rusia sebagai aktor otoritarian di bawah pimpinan Putin
Konstruktivisme	NATO dan Uni Eropa sebagai aktor penyebar identitas non-Rusia	Identitas non-Rusia berbenturan dengan identitas Rusia	Identitas dan Persepsi Elit Rusia yang menolak sikap anti-Rusia
Dua Logika Plural	NATO dan Uni Eropa sebagai representasi imperialisme Amerika dan ekspansi kapital	Kapitalisme Rusia	Aliansi elit politik dan kelas kapitalis Rusia

Tabel 2.1 Hasil Komparasi *Literature Review*